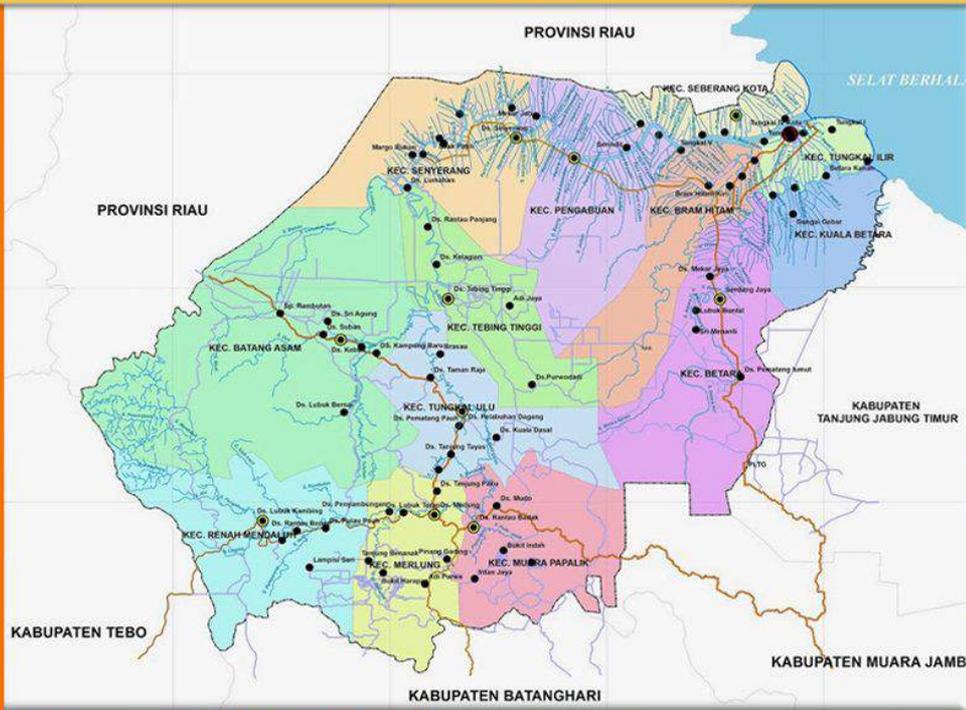




**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016 - 2021
(Perubahan)**



TAHUN 2019



**“ Pendidikan dan Kebudayaan
Sebagai Gerakan Pencerdasan dan
Pembentukan
Generasi Berjiwa Pancasila ”**



KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh..

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua...

Alhamdulillah wasyukurillah, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat 2016-2021 dapat diselesaikan. Renstra menggambarkan secara umum keadaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan serta Target Capaian Kinerja selama 5 Tahun kedepan.

Renstra Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan pedoman bagi seluruh pengelola Pendidikan dan Kebudayaan diwilayah Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai acuan bagi Unit-Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Barat.

Renstra Pendidikan dan Kebudayaan ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh seluruh jajaran pengelola pendidikan serta para pemangku kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan, dengan harapan akan bermanfaat dalam rangka melakukan upaya-upaya pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kab. Tanjung Jabung Barat.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Penyesuaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 -2021.



Kuala Tungkal, Mei 2019,
Kepala Dinas,

M. A. TUNIS M. YUSUF, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198501 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan yg memuat Program dan Kegiatan Strategis yg akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan (2016-2021). Untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkanlah **Visi** :

Visi : “ Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif “

Untuk mewujudkan Visi tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan 3 (tiga) **Misi** sebagai berikut :

Kode	Misi (M)
M1	<i>Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yg meluas,merata dan berkeadilan</i>
M2	<i>Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu serta berdaya saing serta kepastian dalam pelayanan Pendidikan</i>
M3	<i>Mewujudkan Kualitas Tatanan Masyarakat dalam Beragama dan Berbudaya serta Optimalisasi kapasitas sumberdaya kelembagaan Dinas Pendidikan dalam upaya mewujudkan tatakelola yang prima, akuntabel guna tercapainya Good Governance bidang pendidikan.</i>

Dalam upaya mewujudkan 3 (tiga) Misi tersebut telah ditetapkan 2 (dua) **Tujuan Strategis (TS)** yakni :

Kode	Tujuan Strategis (TS)
T1	<i>Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat</i>
T2	<i>Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter</i>
T3	<i>Peningkatan Kualitas Tatanan Masyarakat dalam Beragama dan Berbudaya</i>



Untuk mewujudkan **Tujuan Strategis (TS)** ditetapkanlah 5 (Lima), **Sasaran Strategis (SS)**, dan **13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	
1	2	3		4	
1	Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat	SS1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk usia dewasa Usia 15 - 59 th
				IKSS1.2	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun
2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS2	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKSS2.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI
				IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
				IKSS2.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
				IKSS2.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
		SS3	Meningkatkan Profesionallisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	IKSS3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)
3	Peningkatan Kualitas Tatanan Masyarakat dalam beragama dan berbudaya	SS4	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah	IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas
				IKSS4.2	Jumlah Hasil Karya Individu yang telah memiliki HAKI
4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi	SS5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, AKIP dan Keuangan	IKSS5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				IKSS5.2	Nilai AKIP
				IKSS5.3	Pelaporan Keuangan Sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)
				IKSS6.1	Jumlah Masyarakat Lulusan Perguruan Tinggi



Selain itu telah ditetapkan pula *Strategi* dan *Kebijakan* untuk mencapai target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagaimana berikut :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021							
VISI (RPJMD)		: Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur Bermartabat dan Berkualitas					
MISI II (RPJMD)		: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup					
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		
1		2	3		4		
T1	Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat	SS1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	1.1	Penyediaan sarana dan Prasarana pada semua tingkatan pendidikan secara merata.	1.1.1	Membangun dan merehabilitasi sarana prasarana penunjang pendidikan.
				1.2	Pengawasan yg lebih ketat dan akuntabel dalam penggunaan anggaran pendidikan yg bersumber dana BOS, KIP dan lainnya sehingga tepat sasaran.	1.2.1	Mendorong pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan pendidikan.
						1.2.2	Membangun koordinasi yg lebih aktif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam mendorong pembangunan pendidikan di Kab.Tanjung Jabung Barat.
T2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS2	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	2.1	Penyediaan sarana dan Prasarana yg bermutu pada semua tingkatan pendidikan secara merata.	2.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana bermutu penunjang pendidikan yg lebih merata.
						2.1.2	Menerapkan kurikulum belajar sesuai dengan standar nasional
				2.2	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan berkompeten/professional secara merata.	2.2.1	Kualifikasi dan Sertifikasi
						2.2.2	Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan
				2.3	Penyediaan system pembelajaran sesuai dengan SNP (Standar Nasional Pendidikan)	2.3.1	Penguatan evaluasi akreditasi sekolah
						2.3.2	Mendorong peningkatan akreditasi sekolah

MISI II (RPJMD)		: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup					
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		
1		2	3		4		
T2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS3	Meningkatkan Profesionallisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	3.1	Meningkatkan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui sertifikasi profesi	3.1.1	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat teknis
						3.1.2	Meningkatkan mutu pendidik melalui pendidikan terstruktur dan berkualitas
				3.2	Penyediaan data dan informasi pendidikan	3.2.1	Validasi Data Pokok Pendidikan
						3.2.2	Penyediaan subsidi bagi Pendidik dan tenaga kependidikan



MISI IV (RPJMD) :		Meningkatkan persatuan dan kesatuan Daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintah yang baik				
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
1		2	3		4	
T3	Peningkatan Kualitas Tatahan Masyarakat dalam beragama dan berbudaya	SS4 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah	4.1	Meningkatkan Peran masyarakat dalam pelestarian dan keragaman Budaya	4.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan seni budaya yg memadai
					4.1.2	Mengali kebudayaan local untuk dikembangkan lagi
			4.2	Peningkatan Khasanah Budaya Daerah	4.2.1	Peningkatan penerapan mata pelajaran muatan local disekolah
					4.2.2	Penyediaan sarana dan prasana kegiatan seni budaya.
T4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi	SS5 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh bidang;	5.1.1	Penyempurnaan sistem manajemen dan akuntabilitas pelaporan kinerja Dinas DIRBUD secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik
			5.2	Penguatan pengawasan terhadap kinerja bidang dan subbidang	5.2.1	Evaluasi rutin
			5.3	Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;	5.3.1	Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang.

Untuk mewujudkan *Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan* Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui 11 (Sebelas) **Program** antara lain :

No	Program	Penanggung Jawab
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat/Bidang
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Sekretariat
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sekretariat
5	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sekretariat
6	Pemberian Beasiswa Daerah	Sekretariat
7	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Bidang PAUD dan Dikmas
8	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Bidang Pendidikan Dasar
9	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
10	Pengembangan Nilai Budaya	Bidang Budaya
11	Pelestarian Nilai dan Pengembangan kebudayaan	Bidang Budaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
SURAT KEPUTUSAN	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14
2.3 Kinerja Pelayanan 2011-2015	19
2.3.1 Pendidikan Anak Usia Dini	24
2.3.2 Pendidikan Dasar Wajib 9 Tahun	25
2.3.3 Pendidikan Non Formal Informal	33
2.3.4 Program Kegiatan serta Pendanaan	34
2.3.5 Budaya dan Seni	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pendidikan 2016-2021	31
2.4.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019	31
2.4.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi 2016-2021	35
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	57
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	57
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	64
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi	67
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	71
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	74

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	65
4.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	67
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
5.1	Strategi dan Kebijakan	83
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	87
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII	PENUTUP	81
LAMPIRAN		
Lampiran 1	Tabel T-B.35 Pemetaan Masalah untuk penentuan Prioritas dan Sasaran	
Lampiran 2	Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
Lampiran 3	Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	
Lampiran 4	Tabel T-C.25 Tujuan Dan Sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah	
Lampiran 5	Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan	
Lampiran 6	Tabel T-C.27 Matriks Kinerja dan Pendanaan Program Kegiatan	
Lampiran 7	Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan Sasarn RPJMD	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28 Ayat (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 31 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, berkesinambungan, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar bidang pendidikan dengan bidang pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen



pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur pembagian urusan bidang pendidikan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Dalam hal ini Sub Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah sub urusan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Sub urusan kurikulum meliputi penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat. Sub urusan pendidikan dan tenaga kependidikan meliputi Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota. Sub urusan perizinan pendidikan meliputi penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sub urusan bahasa dan sastra meliputi pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Upaya pembangunan bidang pendidikan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan menyusun perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabilitas yang tinggi. Berkaitan dengan ini pemerintah sudah menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategis tentang program-program utama yang akan dicapai dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pada Pasal 15 ayat (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah dan Pasal 19 ayat (4)



Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupatenupaten Tanjung Jabung Barat No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai Tugas Pokok adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatenupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Untuk merealisasikan Tugas pokok dan Fungsi serta menjabarkan strategi untuk mencapai Visi dan Misi tersebut perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Tanjab Barat 2016-2021.

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang dihadapi dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan diimplementasikan kedalam Renja tahunan.

1.2. Landasan Hukum.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Tanjab Barat 2016-2021 disusun berdasarkan landasan berikut ini :

A. Landasan Idiil yaitu Pancasila

B. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;

C. Landasan Operasional, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen keempat)
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen



8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Rencana Panjang Kabupatenupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Kabupatenupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupatenupaten Tanjung Jabung Barat;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
 32. Peraturan Daerah Kabupatenupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 33. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang Kependidikan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Tanjung Jabung Barat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021.
2. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 – 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Kerangka perumusan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan



1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 dan Renstra Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi jambi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

- Lampiran - lampiran



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
4. pelaksanaan administrasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Sebagai catatan bahwa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk pembagian kewenangan antara Pemerintah



Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Tingkat Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Pendidikan Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sesuai dengan kesepakatan selambat-lambatnya Maret 2017 telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten. Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

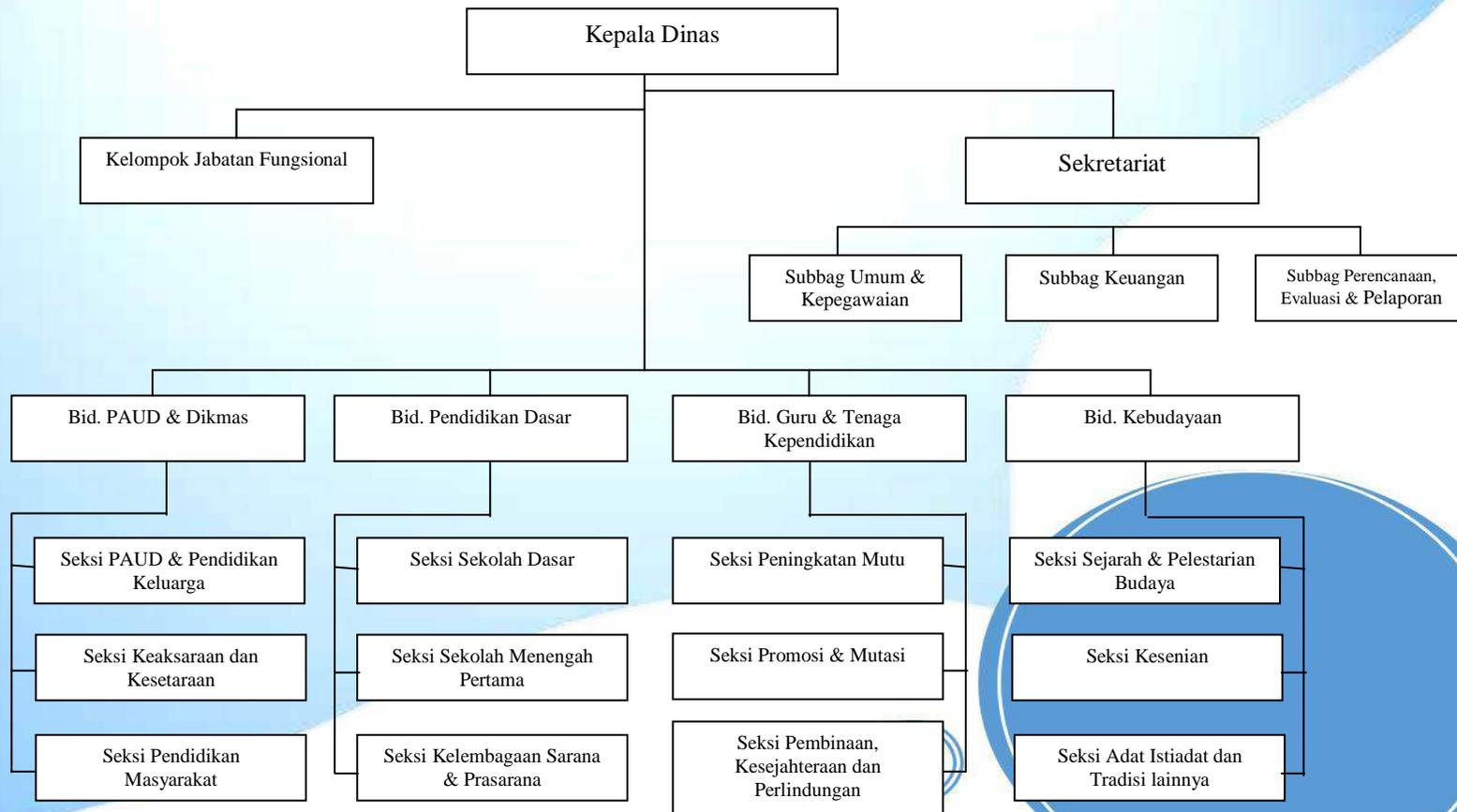
- 1). Kepala Dinas,
- 2). Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu :
 - (a). Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - (b). Subbagian Keuangan ; dan
 - (c). Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program;
- 3). Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - (a). Seksi Sekolah Dasar;
 - (b). Seksi Pendidikan Menengah Pertama ; dan
 - (c). Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana;
- 4). Bidang PAUD dan Dikmas , terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - (a). Seksi PAUD dan Pendidikan Keluarga ;
 - (b). Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan; dan
 - (c). Seksi Pendidikan Masyarakat ;



- 5). Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - (a). Seksi Peningkatan Mutu;
 - (b). Seksi Promosi dan Mutasi
 - (c). Seksi Pembinaan, Kesejahteraan dan Perlindungan.
- 6). Bidang Kebudayaan, terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - (a). Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya ;
 - (b). Seksi Kesenian; dan
 - (c). Seksi Adat Istiadat dan Tradisi lainnya ;



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT





2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam salah satu tugas pokoknya, yaitu membina dan melaksanakan PAUD, Pendidikan Taman Kanak-kanak dan SD (PTKSD), Pendidikan SMP (PSPM), dan Pendidikan Nonformal dan Informal.

Untuk menangani tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di dukung oleh sumber daya sebagaimana tercantum pada tabel 1 di halaman berikut ini :

Tabel. 2.1 : Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Gol./Ruang & Pendidikan

No	Gol/Ruang	Jumlah	Tingkat Pendidikan	
			S1	S2
1	2	3	4	5
1	IV/c	1	-	1
2	IV/b	-	-	-
3	IV/a	16	13	3
4	III/d	7	6	1
5	III/c	4	3	1
6	III/b	16	12	-
7	III/a	2	-	-
8	II/d	1	-	-
9	II/c	2	-	-
10	II/b	2	-	-
11	II/a	2	-	-
12	TKK/TKS	50	16	-
	Jumlah total	95	50	6

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2015

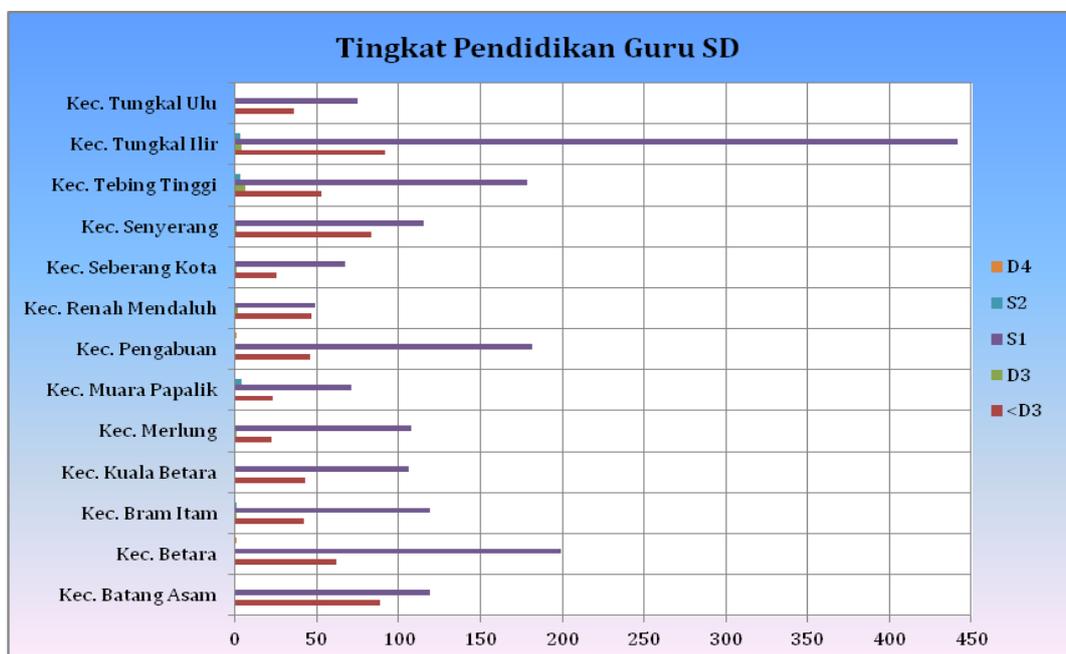


Selain sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai ujung tombak juga didukung oleh kondisi sumberdaya manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang berada di sekolah-sekolah yang tersebar pada 13 kecamatan. Kondisi PTK di perlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2015.

Persentase	26.28%	0.63%	0.08%	72.57%	0.44%	
Wilayah	<D3	D3	D4	S1	S2	Jlh
Jumlah	663	16	2	1831	11	2523
Kecamatan Batang Asam	89	0	0	119	0	208
Kecamatan Betara	62	0	1	199	0	262
Kecamatan Bram Itam	42	1	0	119	1	163
Kecamatan Kuala Betara	43	0	0	106	0	149
Kecamatan Merlung	22	1	0	108	0	131
Kecamatan Muara Papalik	23	0	0	71	4	98
Kecamatan Pengabuan	46	0	1	182	0	229
Kecamatan Renah Mendaluh	47	2	0	49	0	98
Kecamatan Seberang Kota	25	1	0	67	0	93
Kecamatan Senyerang	83	1	0	115	0	199
Kecamatan Tebing Tinggi	53	6	0	179	3	241
Kecamatan Tungkal Ilir	92	4	0	442	3	541
Kecamatan Tungkal Ulu	36	0	0	75	0	111

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Guru SD





Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan guru SD telah menunjukkan kemajuan yang baik, dimana terdapat 72.57% guru sudah memenuhi kompetensi S1 yakni sebanyak 1.831 orang dari total 2.523 guru. Jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir sebanyak 541 guru. Sedangkan untuk pendidikan Strata Dua hanya 0.44% dari total guru yang ada atau sebanyak 11 guru. Ini perlu menjadi perhatian serius bagi daerah apalagi berdasarkan RPJPN 2005-2025 tujuan akhir dari pendidikan nasional adalah ***Daya Saing Tingkat Internasional***.

Untuk kondisi tenaga guru yang terdapat pada jenjang pendidikan SMP tingkat pendidikan yang memenuhi kompetensi S1 telah mencapai 78.54% atau sebanyak 688 orang. Tentu ini lebih baik bila dibandingkan Sekolah Dasar. Hal ini tergambar Tabel 2.3 dan pada grafik berikut ini :

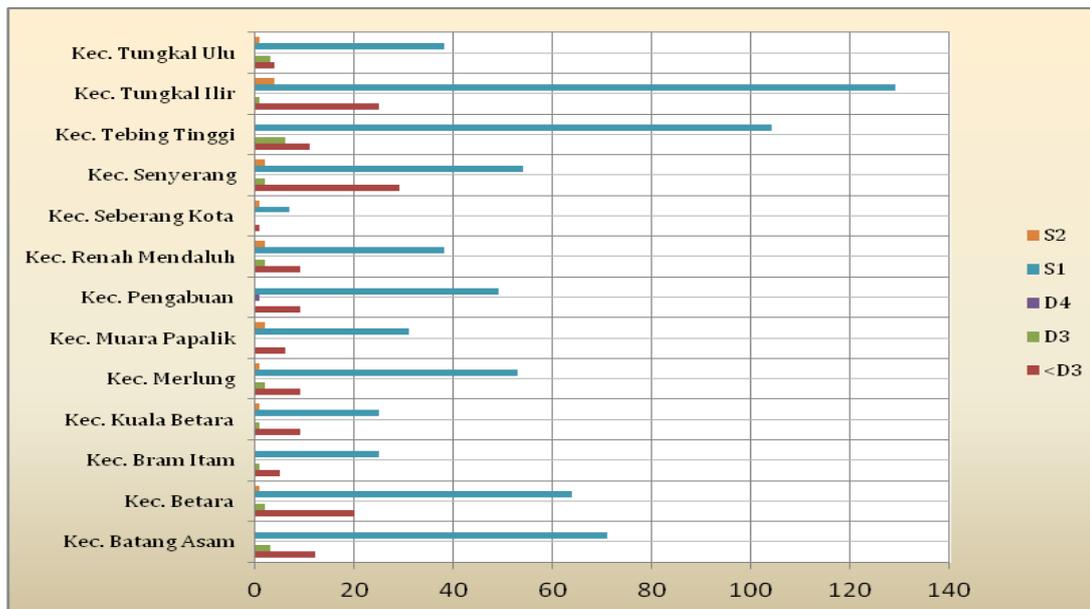
Tabel 2.3. Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Tingkat SMP 2015.

Persentase	17.01%	2.63%	0.11%	78.54%	1.71%	
Wilayah	<D3	D3	D4	S1	S2	Jlh
Jumlah	149	23	1	688	15	876
Kecamatan Batang Asam	12	3	0	71	0	86
Kecamatan Betara	20	2	0	64	1	87
Kecamatan Bram Itam	5	1	0	25	0	31
Kecamatan Kuala Betara	9	1	0	25	1	36
Kecamatan Merlung	9	2	0	53	1	65
Kecamatan Muara Papalik	6	0	0	31	2	39
Kecamatan Pengabuan	9	0	1	49	0	59
Kecamatan Renah Mendaluh	9	2	0	38	2	51
Kecamatan Seberang Kota	1	0	0	7	1	9
Kecamatan Senyerang	29	2	0	54	2	87
Kecamatan Tebing Tinggi	11	6	0	104	0	121
Kecamatan Tungkal Ilir	25	1	0	129	4	159
Kecamatan Tungkal Ulu	4	3	0	38	1	46

Sumber : Data DAPODIK per 01-02-2016



Grafik 2. Tingkat Pendidikan Guru SMP



Selain tingkat pendidikan salah satu indikator yang menunjang bahwa PTK merupakan tenaga profesional adalah kepemilikan sertifikasi bagi guru. Untuk mencapai kepemilikan sertifikasi tenaga pendidik/kependidikan akan diuji melalui ujian sertifikasi bagi yang memenuhi syarat administrasi. Ujian diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil ujian bagi PTK yang memenuhi syarat minimal yang ditentukan, akan memperoleh sertifikasi mengajar dengan penghargaan mendapat tunjangan sertifikasi guru profesional.

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercatat guru SD/SMP yang memenuhi syarat dimaksud dan telah mengantongi sertifikasi sebanyak 1.260 orang dari total 3.079 orang atau sebesar 40.92% yang terdiri atas 28.42% guru kelas SD, 0.52% guru kelas SDLB dan 11.98% guru mata pelajaran untuk SMP. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.4. dan Grafik 3 berikut ini :



Tabel 2.4.
Prosentase dan Jumlah Sertifikasi Guru SD/SMP 2015.

Wilayah	28.42%		0.52%		11.98%		Jumlah Sertifikasi	Jumlah Guru
	Guru Kelas SD		Guru Kelas SDLB		Guru Mata Pelajaran			
	L	P	L	P	L	P		
Jumlah	307	568	7	9	174	195	1260	3079
Kecamatan Batang Asam	27	50	0	0	12	20	109	265
Kecamatan Betara	39	39	0	0	18	16	112	317
Kecamatan Bram Itam	22	37	2	2	11	9	83	172
Kecamatan Kuala Betara	19	23	0	0	12	2	56	166
Kecamatan Merlung	21	29	1	0	16	15	82	171
Kecamatan Muara Papalik	23	23	0	0	11	5	62	132
Kecamatan Pengabuan	31	39	0	0	15	7	92	258
Kecamatan Renah Mendaluh	13	13	0	0	5	7	38	143
Kecamatan Seberang Kota	7	8	0	0	5	1	21	97
Kecamatan Senyerang	24	19	0	0	15	5	63	265
Kecamatan Tebing Tinggi	27	54	0	0	12	33	126	337
Kecamatan Tungkai Ilir	42	204	3	7	38	71	365	608
Kecamatan Tungkai Ulu	12	30	1	0	4	4	51	148

Sumber : Data DAPODIK per 01-02-2016

Grafik 3. Persentase Sebaran Guru Bersertifikasi





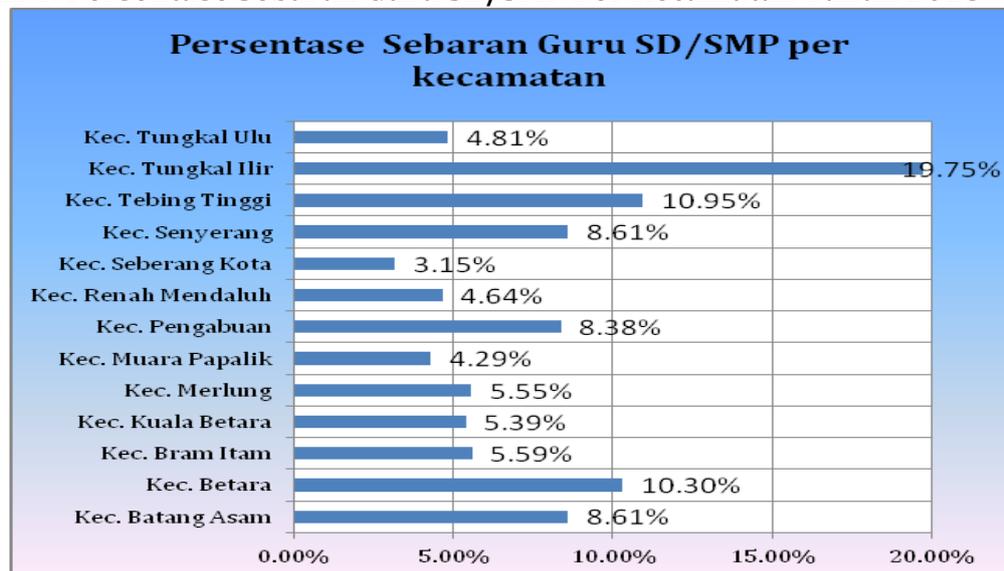
Kondisi penyebaran guru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan sekitar 16.6% untuk perbandingan daerah yang padat penduduk dengan wilayah jarang penduduk, artinya bahwa kesenjangan penyebaran guru ini disebabkan oleh kondisi jumlah SD/SMP yang ada di kecamatan serta banyaknya jumlah siswa. Kondisi Sebaran Guru disajikan dalam Tabel 2.5 dan Grafik 4.

Tabel 2.5. Sebaran Guru SD/ SMP 2015

Wilayah	Guru Kelas	Guru MP	Jlh	% Sebaran per Kecamatan
umlah	1778	1301	3079	
Kecamatan Batang Asam	155	110	265	8.61%
Kecamatan Betara	177	140	317	10.30%
Kecamatan Bram Itam	103	69	172	5.59%
Kecamatan Kuala Betara	104	62	166	5.39%
Kecamatan Merlung	90	81	171	5.55%
Kecamatan Muara Papalik	72	60	132	4.29%
Kecamatan Pengabuan	163	95	258	8.38%
Kecamatan Renah Mendaluh	80	63	143	4.64%
Kecamatan Seberang Kota	71	26	97	3.15%
Kecamatan Senyerang	150	115	265	8.61%
Kecamatan Tebing Tinggi	189	148	337	10.95%
Kecamatan Tungkal Ilir	350	258	608	19.75%
Kecamatan Tungkal Ulu	74	74	148	4.81%

Sumber : Data DAPODIK per 01-02-2016

Grafik 4. Persentase Sebaran Guru SD/SMP Per Kecamatan Tahun 2015





Tidak dapat dipungkiri juga bahwa tingkat penyebaran guru tersebut juga cenderung ke daerah perkotaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan masih terdapat sebaran Guru kurang merata. Hal ini disebabkan kecenderungan dari pribadi PTK tersebut yang memilih untuk mengajar pada daerah yang relatif lebih maju. Selain itu dikarenakan oleh alasan keluarga. Aspek penting lainnya berkaitan dengan kondisi kualitas guru yang diukur dengan Tingkat Kompetensi. Gambaran kompetensi guru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Hasil nilai Uji Kompetensi Guru terlihat dari grafik 5 berikut. Secara nasional Nilai UKG rata-rata adalah 56,69 sedangkan untuk daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh rata-rata untuk keempat jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK adalah 52,15. Angka ini masih dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi. Secara umum kondisi sebaran untuk jumlah sekolah serta jumlah siswa dari 13 kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat tabel berikut ini :



Tabel 2.6. Sebaran Sekolah dan Siswa SD dan SMP 2015

No	Kecamatan	Jumlah Gedung Sekolah				Jumlah Siswa	
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP
1	Tungkal Ulu	11	5	1	1	1631	501
2	Pengabuan	25	5	2	1	2762	587
3	Tungkal Ilir	31	7	4	2	8259	2451
4	Betara	19	6	2	1	3494	811
5	Merlung	12	4	2	1	2031	823
6	Batang Asam	14	6	2	1	4290	1317
7	Tebing Tinggi	17	8	3	1	4643	1670
8	Renah Mendaluh	10	4	2	1	1948	554
9	Muara Papalik	10	3	1	0	1288	353
10	Senyerang	23	7	4	0	2744	555
11	Bram Itam	11	2	1	0	1914	183
12	Seberang Kota	10	1	0	0	1003	52
13	Kuala Betara	17	4	1	0	1230	289
	Jumlah	210	62	25	9	37.237	10.146

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2015

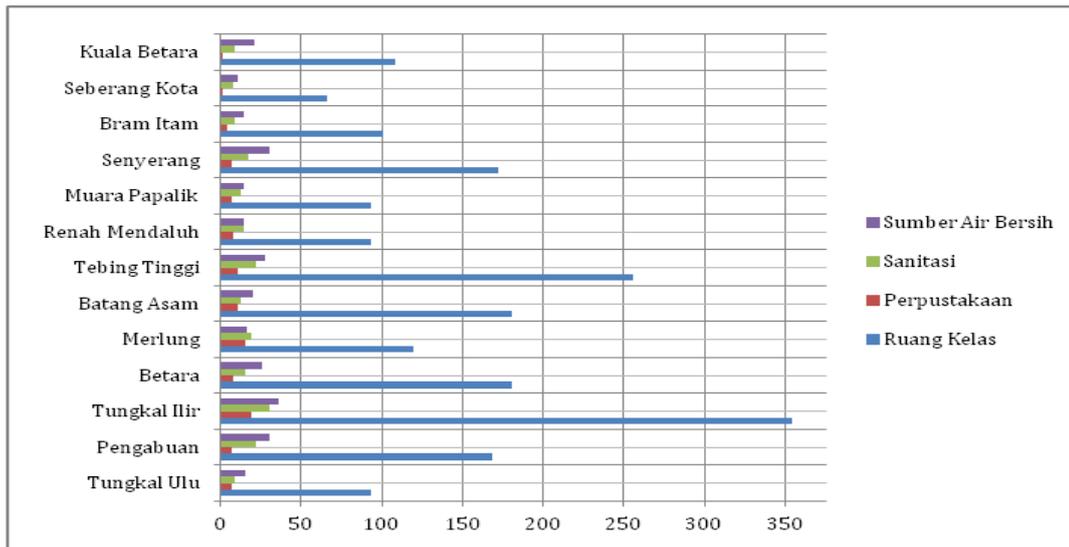


Kondisi sarana dan prasarana menjadi hal yang cukup penting karena mempengaruhi kualitas proses pembelajaran, dibawah ini akan ditampilkan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana SD/SMP sampai dengan tahun 2015 yang berada pada 13 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Prasarana yang dimaksud dalam hal ini adalah ruang kelas, ruang perpustakaan, sanitasi dan air bersih.

Tabel 2.7. Kondisi sarana SD/SMP

No	Kecamatan	Jumlah RK	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Sanitasi	Jumlah Sumber Air Bersih
1	Tungkal Ulu	93	7	9	15
2	Pengabuan	168	7	22	30
3	Tungkal Ilir	354	19	30	36
4	Betara	181	8	15	26
5	Merlung	120	15	19	16
6	Batang Asam	181	11	13	20
7	Tebing Tinggi	256	11	22	28
8	Renah Mendaluh	93	8	14	14
9	Muara Papalik	93	7	13	14
10	Senyerang	172	7	17	30
11	Bram Itam	101	4	9	14
12	Seberang Kota	66	1	8	11
13	Kuala Betara	108	1	9	21
Jumlah		1.986	106	200	275

Grafik 6. Jumlah Sarana dan Prasarana SD/SMP Tahun 2015



Prasarana ruang kelas SD/SMP terdapat 1.986 ruang yang menampung sebanyak 37.237 siswa SD dan 10.146 siswa SMP. Dari total 272 sekolah SD/SMP baru terdapat 106 perpustakaan, artinya bahwa masih terdapat sekitar 166 sekolah yang belum mempunyai fasilitas perpustakaan atau 61,10% dari seluruh sekolah SD/SMP. Prasarana sanitasi dan sumber air bersih juga merupakan kebutuhan pokok mendasar yang wajib ada disekolah, data 2015 memperlihatkan bahwa terdapat 200 unit ketersediaan Toilet dan 275 unit sumber air bersih.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat konsisten menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salah satu komponen penghitungan besaran IPM tersebut adalah Indeks Pendidikan (IP) yang merupakan tugas pokok dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Berdasarkan data statistik dari BPS Provinsi Jambi dengan menggunakan perhitungan IPM metoda baru, angka IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend meningkat. Pada tahun tahun 2011 angka IPM 61,98 sampai dengan tahun 2015 angka IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat menjadi 65,03. Melihat perubahan angka indeks pendidikan di atas yang terus menaik dari tahun ke tahun telah mencitrakan adanya keberhasilan yang cukup signifikan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara tidak langsung menunjukkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Selain hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi Indikator Kinerja Bidang Pendidikan yang juga menjadi acuan kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

A. BIDANG PENDIDIKAN

2.3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

a. APK PAUD

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK PAUD menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 sebesar 42,34 menjadi 44,71 pada tahun 2015. Terjadi peningkatan sebesar 2,37 pada Pendidikan Anak Usia Dini. APK selama periode 5 tahun sebelumnya diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.8. APK PAUD Periode 2011 - 2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
APK	NA	NA	NA	42,34	44.71



2.3.2 Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun

a. APK dan APM Sekolah Dasar (SD) dan SMP

Pada tingkatan pendidikan dasar SD selain tingkat APK, indikator kinerja pelayanan dapat diukur dari tingkat Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sedangkan kegunaan atau tujuan pengukuran APM adalah untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

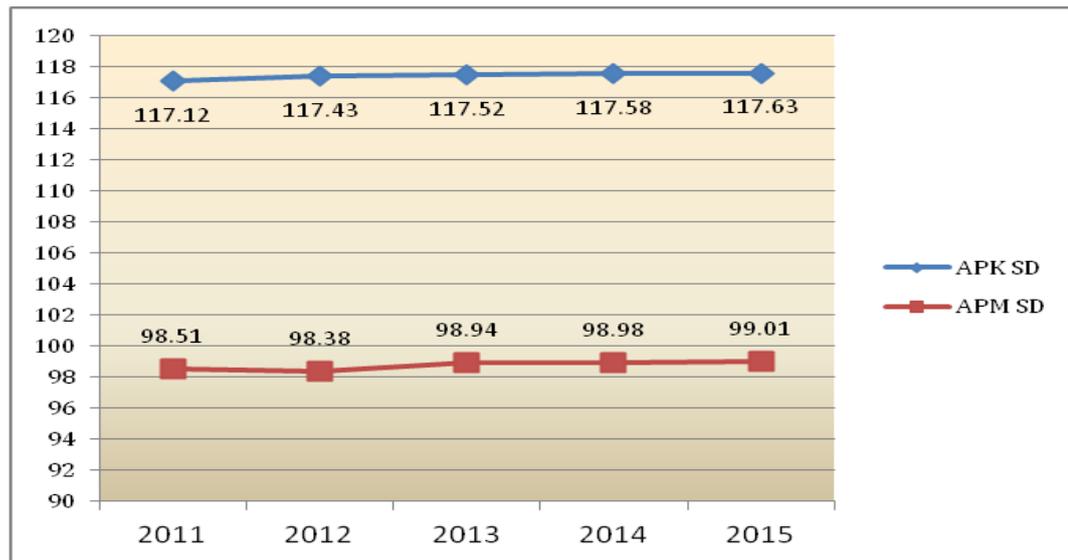
Perkembangan APK dan APM SD dapat dilihat pada table dan grafik sebagai berikut ;

Tabel 2.9. APK dan APM SD Periode 2011 - 2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
APK	117,12%	117,43%	117,52%	117,58%	117,63%
APM	98,51%	98,83%	98,94%	98,98%	99,01%



Grafik 7. APK dan APM SD



Grafik 7 memperlihatkan peningkatan nilai APK dan APM selama 5 tahun yaitu 2011-2015 sebesar : APK 0.51 % dan APM 0.5%.

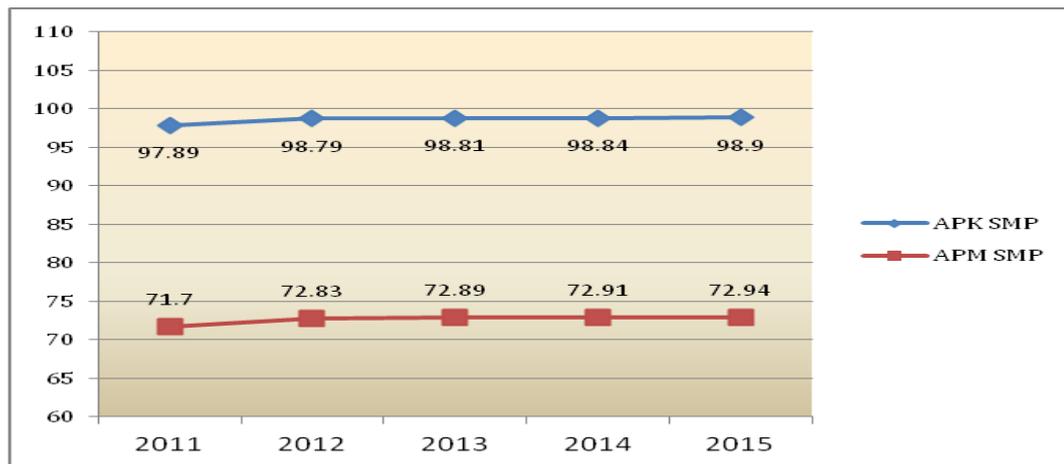
Untuk tingkat pendidikan SMP tingkat APK dan APM diperlihatkan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 2.10 Tabel APK dan APM

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
APK	97,89%	98,79%	98,81%	98,84%	98,9%
APM	71,70%	72,83%	72,89%	72,91%	72,94%



Grafik 8. APK dan APM SMP



Grafik 8 memperlihatkan peningkatan nilai APK dan APM selama periode 5 tahun 2011-2015 yaitu sebesar : APK 1.01 % dan APM 1.24%.

b. Rasio Guru Terhadap Siswa

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menetapkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut: untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1; untuk SD atau yang sederajat 20:1; dan untuk SMP atau yang sederajat 20:1. Maksud rasio tersebut adalah perbandingan antara jumlah guru dan siswa dimana setiap satu orang guru harus mengajar siswa maksimal sebanyak ketentuan yaitu 15 orang untuk TK, 20 orang untuk tingkat SD dan SMP.

Selanjutnya indikator kinerja pelayanan dapat dilihat dari Angka Rasio Guru terhadap Siswa, diartikan bahwa perbandingan antara banyaknya jumlah siswa dengan banyaknya jumlah guru pada suatu daerah tertentu. Untuk kondisi Tanjung Jabung Barat Rasio ini dihitung untuk kondisi daerah perkecamatan sebagaimana terlihat dibawah ini :



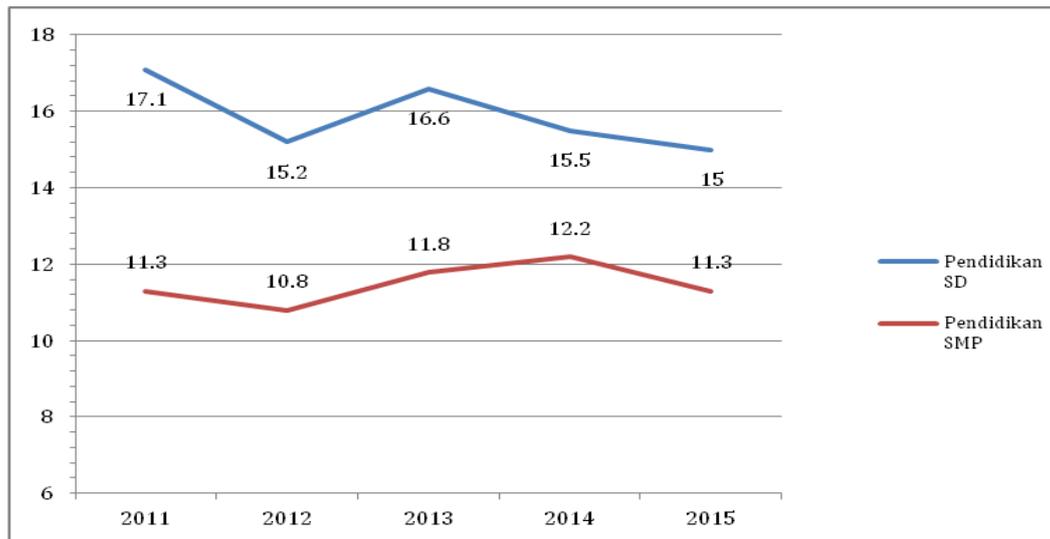
Tabel 2.11
Tabel Rasio Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	SD			SMP		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	$5=(4/3)$	6	7	$8=(7/6)$
1	Kecamatan Tungkal Ulu	110	1631	14.8	59	501	8.5
2	Kecamatan Pengabuan	219	2762	12.6	62	587	9.5
3	Kecamatan Tungkal Ilir	509	8259	16.2	157	2451	15.6
4	Kecamatan Betara	264	3494	13.2	86	811	9.4
5	Kecamatan Merlung	126	2031	16.1	60	823	13.7
6	Kecamatan Batang Asam	202	4290	21.2	97	1317	13.6
7	Kecamatan Tebing Tinggi	236	4643	19.7	128	1670	13.0
8	Kecamatan Renah Mendaluh	104	1948	18.7	47	554	11.8
9	Kecamatan Muara Papalik	107	1288	12.0	37	353	9.5
10	Kecamatan Senyerang	198	2744	13.9	90	555	6.2
11	Kecamatan Bram Itam	160	1914	12.0	28	183	6.5
12	Kecamatan Seberang Kota	94	1003	10.7	8	52	6.5
13	Kecamatan Kuala Betara	148	1230	8.3	39	289	7.4
2015		2477	37237	15.0	898	10146	11.3
2014		2414	37401	15.5	810	9912	12.2
2013		2275	37689	16.6	817	9607	11.8
2012		2487	37830	15.2	868	9378	10.8
2011		2222	37912	17.1	770	8693	11.3

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa SD perkecamatan tertinggi adalah 21.2 di Kecamatan Batang Asam dan yang terkecil adalah 8.3 di Kecamatan Kuala Betara. Sedangkan untuk tingkat SMP rasio guru terhadap siswa tertinggi adalah 15.6 di Kecamatan Tungkal Ilir serta terendah adalah 6.2 di Kecamatan Senyerang.



Grafik 9. Rasio Jumlah Guru dan Murid SD dan SMP



Dari grafik diatas memperlihatkan tingkat Rasio Guru terhadap Siswa SD dan SMP secara keseluruhan di Kabupaten dari tahun 2011-2015. Terlihat terdapat kecenderungan rasio guru SD terhadap siswa yang menurun setiap tahunnya. Begitu pula kondisi Rasio Guru SMP terhadap siswa ditahun terakhir ada penurunan sebesar 0.9 poin. Artinya bahwa kedepan seiring pertumbuhan jumlah penduduk serta anak didik perlu diimbangi dengan pertumbuhan jumlah guru pula.

c. Rasio Peserta didik terhadap sekolah

Rasio peserta didik terhadap sekolah menggambarkan tentang kemampuan daya tampung sekolah rata-rata peserta didik untuk jenjang Pendidikan dasar usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun berdasarkan wilayah per kecamatan. Data ini menggambarkan kondisi dari tahun 2012-2015 sebagaimana tabel tersebut dibawah ini :



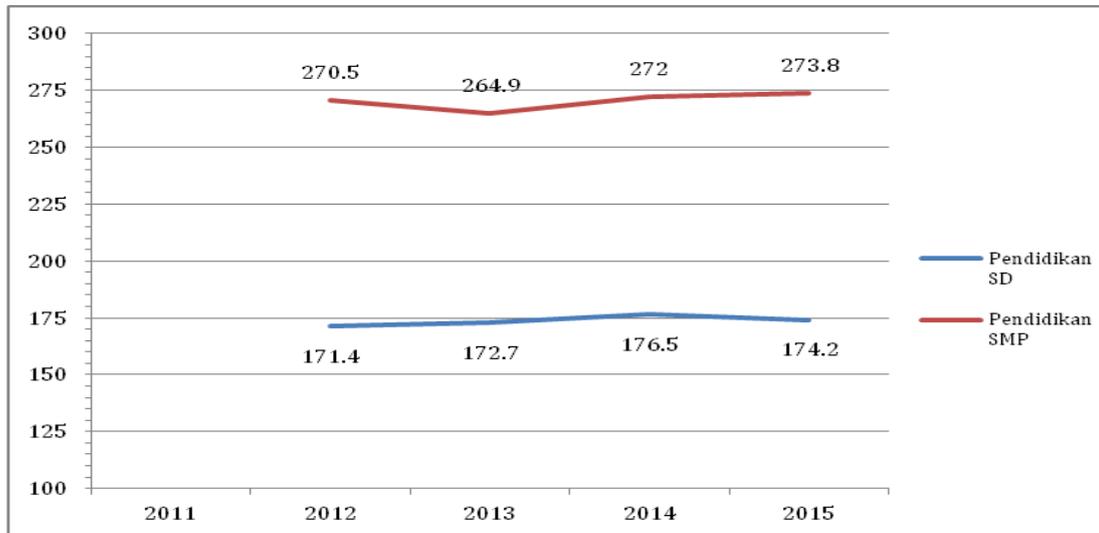
Tabel 2.12
Rasio Peserta Didik dan Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1	Kecamatan	SD			SMP		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Th	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Th	Rasio
2		3	4	$5=(4/3)$	6	7	$8=(7/6)$
1	Tungkal Ulu	11	1440	130.9	5	652	130.4
2	Pengabuan	25	3055	122.2	5	1509	301.8
3	Tungkal Ilir	31	8404	271.1	7	4358	622.6
4	Betara	19	3284	172.8	6	1441	240.2
5	Merlung	12	1797	149.8	4	796	199.0
6	Batang Asam	14	3479	248.5	6	1539	256.5
7	Tebing Tinggi	17	5253	309.0	8	2160	270.0
8	Renah Mendaluh	10	1662	166.2	4	715	178.8
9	Muara Papalik	10	1263	126.3	3	476	158.7
10	Senyerang	23	2727	118.6	7	1340	191.4
11	Bram Itam	11	1744	158.5	2	832	416.0
12	Seberang Kota	10	979	97.9	1	466	466.0
13	Kuala Betara	17	1501	88.3	4	694	173.5
2015		210	36588	174.2	62	16,978	273.8
2014		209	36886	176.5	61	16595	272.0
2013		208	35924	172.7	61	16161	264.9
2012		208	35656	171.4	59	15957	270.5

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio terbesar untuk SD adalah di Kecamatan Tebing Tinggi 309.0 dan terkecil adalah 88.3 di Kecamatan Kuala Betara. Untuk tingkat SMP rasio terbesar di Kecamatan Tungkal ilir 622.6 dan terkecil 130.4 di Kecamatan Tungkal Ulu. Ini berarti bahwa semakin besar rasio suatu wilayah maka besar pula kebutuhan akan ruang kelas/Sekolah baru, begitu pula sebaliknya.



Grafik 10.
Rasio Peserta Didik Terhadap Sekolah Tingkat SD dan SMP



Dari grafik diatas terlihat bahwa rasio siswa terhadap jumlah sekolah terus mengalami peningkatan ini berarti kedepan untuk mengatasi lonjakan jumlah peserta didik maka perencanaan dan penganggaran pembangunan sekolah harus terus diperhatikan dan dicermati.

e. Penyaluran Beasiswa

Penyaluran Beasiswa oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan untuk Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dari Kementerian, adapun jumlah penerima BSM untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.13
Jumlah Penerima BSM Tingkat SD dan SMP
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	Tahun			
		2013		2014	
		SD	SMP	SD	SMP
1	Tungkal Ulu	2027	43	2366	53
2	Pengabuan	483	222	263	215
3	Tungkal Ilir	801	569	750	601
4	Betara	852	183	863	167
5	Merlung	451	47	370	40
6	Batang Asam	416	146	672	141
7	Tebing Tinggi	554	48	552	57
8	Renah Mendaluh	513	101	82	101
9	Muara Papalik	170	17	123	14
10	Senyerang	1229	126	1298	112
11	Bram Itam	424	55	467	54
12	Seberang Kota	513	14	36	14
13	Kuala Betara	304	143	49	163
Jumlah 2014		8,737	1,714	7,891	1,732

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2015 (BEASISWA BSM)

Selain Beasiswa BSM dari Kementerian siswa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menerima Beasiswa SAMISAKE dari Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah penerima dan jumlah dana beasiswa SAMISAKE yang telah disalurkan dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Jumlah Penerima dan Jumlah Dana Beasiswa SAMISAKE 2012-2014

No	TAHUN	SISWA MENERIMA	JML DANA
1	2012	1805	Rp1,567,500,000.00
2	2013	2108	Rp1,844,750,000.00
3	2014	2254	Rp2,021,500,000.00
TOTAL		6167	Rp5,433,750,000.00

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2015 (BEASISWA SAMISAKE)



2.3.3. Pendidikan Masyarakat (Non Formal Informal).

a. Angka Melek Huruf (AHM)

Angka Melek Huruf merupakan indikator utama dalam bidang pendidikan nonforma. Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Kondisi perkembangan AMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu 5 tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.16
Prosentase Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode 2011 - 2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Melek Aksara	NA	97.93%	98.17%	98,21%	98,36%

Dari tabel di atas terlihat peningkatan angka melek sebesar 98,36% untuk penduduk usia 15-59 tahun di Kabupaten. Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2015.

**b. Rata-rata Lama Bersekolah**

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.17
Rerata Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Lama Bersekolah	6.86 thn	7 thn	7.24 thn	7.28 thn	7.37 thn

Sumber : BPS, Tanjung Jabung Barat

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa lama bersekolah di Kabupaten tanjung Jabung Barat selama 7,37 Tahun pada tahun 2015 meningkat dari Tahun 2014 selama 7,28 tahun. Lama sekolah ini menunjukkan bahwa Masyarakat Tanjung Jabung Barat berpendidikan rata-rata setara dengan kelas VII (Kelas satu SMP/ sederajat).

2.3.4. Program Kegiatan serta Pendanaan.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam peningkatan dunia Pendidikan sangatlah berarti dan sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah serapan anggaran pendidikan yang angka rata-rata sebesar 98,26% selama 5 Tahun sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini :



Tabel 2.18
Jumlah Serapan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011 - 2015

Program	Anggaran		Realisasi		
	Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan		Fisik (%)
Jumlah			%		
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	3,966,241,600	9.17	3,862,724,927	97.39	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18,214,096,300	42.10	17,772,994,644	97.58	100
Program Peningkatan disiplin Aparatur	561,550,000	1.30	542,953,000	96.69	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29,692,400	0.07	28,442,400	95.79	100
Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,338,926,800	7.72	3,081,383,600	92.29	100
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	1,999,675,000	4.62	1,924,916,100	96.26	100
Program Pendidikan Menengah	1,127,440,200	2.61	1,068,706,500	94.79	100
Program Pendidikan Non Formal	1,456,170,700	3.37	1,262,530,700	86.70	83.33
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1,648,244,600	3.81	1,351,474,050	81.99	100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	348,023,100	0.80	326,541,400	93.83	100
Program proses Belajar Mengajar	10,570,692,500	24.43	10,412,736,623	98.51	100
JUMLAH 2015	43,260,753,200		41,635,403,944	96.24	98.48
JUMLAH 2014	68,486,671,100		61,045,998,161	89.14	99.09
JUMLAH 2013	52,550,137,603		47,946,991,522	91.24	96.99
JUMLAH 2012	38,050,600,220		36,292,898,984	95.38	96.83
JUMLAH 2011	41,748,515,375		40,548,931,885	97.13	99.91
JUMLAH 2011-2015	244,096,677,498		227,470,224,496	93.19	98.26

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2015



B. BIDANG KEBUDAYAAN

2.3.5. Budaya dan Seni

Pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan dengan membina berbagai kelompok kesenian dan budaya lokal. Selain itu dilaksanakan pula identifikasi peninggalan situs-situs kebudayaan lokal yang tersebar di kecamatan, serta pengembangan kurikulum budaya dan seni sebagai kurikulum muatan lokal pada tingkat Sekolah Dasar.

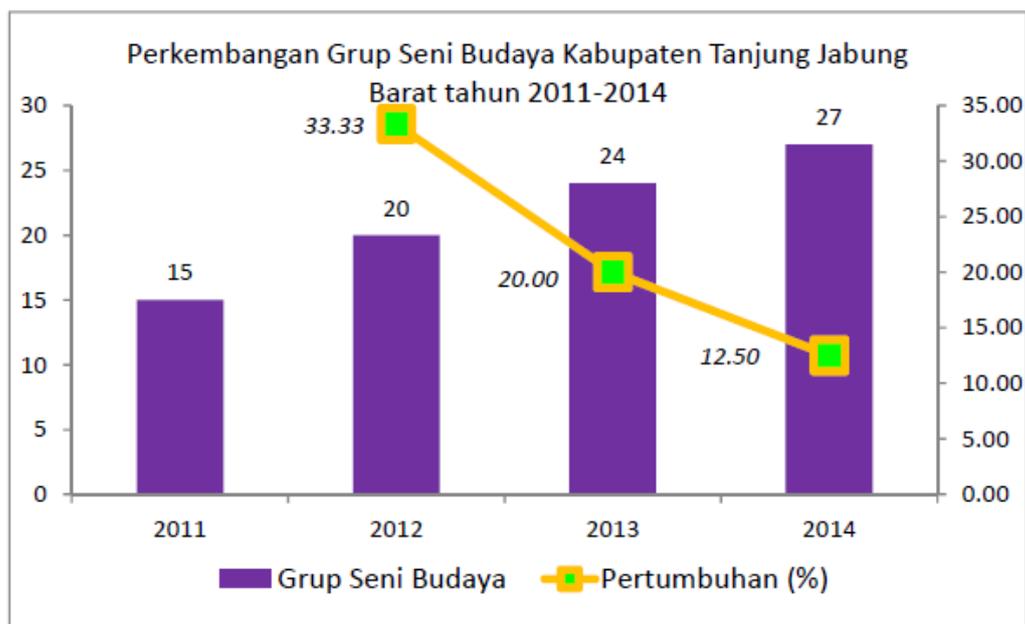
Perkembangan Grup Seni Budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2011-2014 disajikan pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.19
Jumlah Kelompok Budaya di Kabupaten Tanjab Barat

Indikator	2011	2012	2013	2014
Grup Seni Budaya	15 Grup	20 Grup	24 Grup	27 Grup

mengalami perkembangan mulai dari 15 Grup menjadi 27 Grup pada tahun 2014

Grafik 12. Perkembangan Grup Seni Budaya

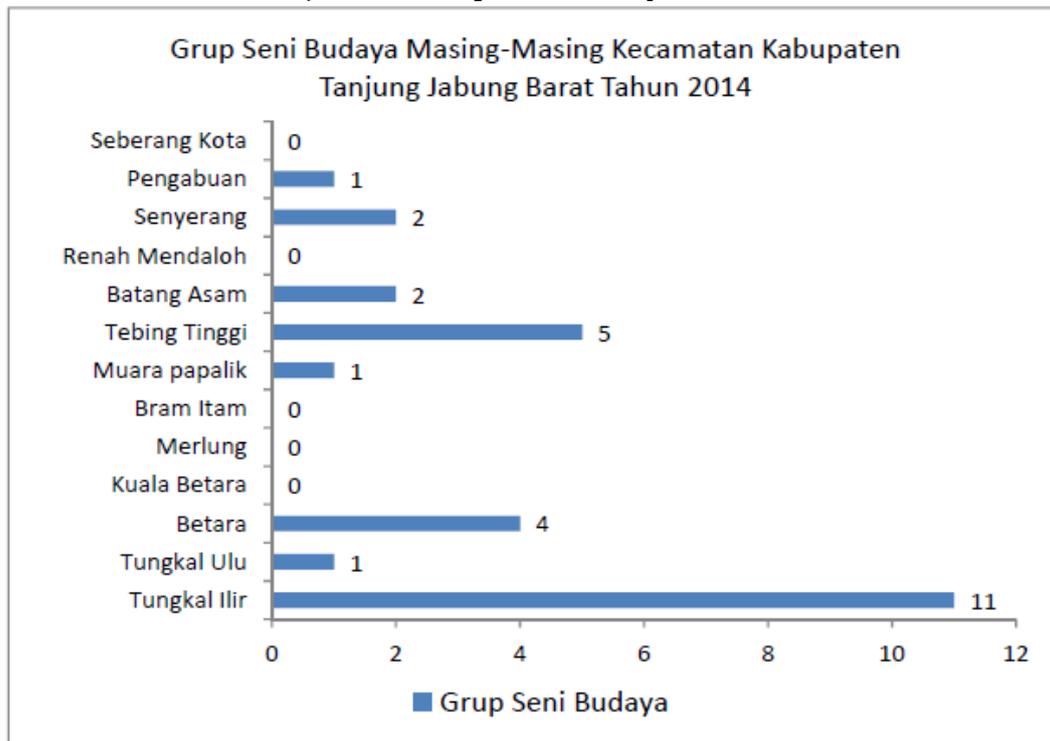


Adapun penyebaran grup seni budaya ini tidak tersebar merata di 13 Kecamatan di Kabupaten.Tanjung Jabung Barat hanya pada 8 Kecamatan. Antara lain



Pengabuan, Senyerang, Batang Asam, Tebing Tinggi, Muara Papalik, Betara, Tungal Ulu dan Tungal Ilir sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 13. Jumlah Grup Seni Budaya Per Kecamatan 2014



Adapun ringkasan tabel dapat dilihat pada Tabel T-C.23 dan T-C.24



Tabel T-C. 23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015

No	Indikator Kinerja sesuai TUPOKSI	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun Ke-					Rasio capaian Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Melek Huruf				98.10%	98.30%	98.50%	98.70%	98.90%		97.93%	98.17%	98.21%	98.36%	-	0.996	0.997	0.995	0.995
2	APK PAUD				50.20%	52.90%	55.60%	58.30%	61%				42.03%	44.71%	-	-	-	0.721	0.733
3	APK SD				116.22%	116.44%	116.66%	116.88%	117.10%	117.12%	117.43%	117.52%	117.58%	117.63%	1.008	1.009	1.007	1.006	1.005
4	APM SD				97.32%	97.54%	97.76%	97.98%	98.20%	98.51%	98.83%	98.94%	98.98%	99.01%	1.012	1.013	1.012	1.01	1.008
5	APK SMP				97.21%	98.31%	99.41%	1005.51%	101.61%	97.89%	98.79%	98.81%	98.84%	98.90%	1.007	1.005	0.994	0.098	0.973
6	APM SMP				71.26%	72.06%	74.16%	75.26%	76.36%	71.70%	72.83%	72.89%	72.91%	72.94%	1.006	1.011	0.983	0.969	0.955
7	APK SMA/SMK				68.04%	69.97%	71.90%	73.83%	75.76%	67.44%	67.97%	69.91%	69.94%	69.94%	0.991	0.971	0.972	0.947	0.923
8	APM SMA/SMK				48.01%	49.94%	51.87%	53.80%	55.73%	47.39%	48.26%	51.89%	51.91%	51.95%	0.987	0.966	1	0.965	0.932
9	Angka Rata-rata Lama Bersekolah (Thn)				7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	7.51	7.54	8.1	8.3	8.5	0.975	0.954	1	1	1
10	Rasio Guru thd Murid				1:22	1:20	1:19	1:18	1:17						1.616	1.583	1.377	1.318	1.319
	Tingkat SD									01:17.1	01:15.2	01:16.6	01:15.5	1:15	1.286	1.315	1.144	1.161	1.133
	Tingkat SMP									01:11.3	01:10.8	01:11.8	01:12.2	01:11.3	1.946	1.851	1.61	1.475	1.504



Tabel T-C. 24

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-n (d/m Juta)					Realisasi Anggaran Tahun ke-n (d/m juta)					Rasio Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	41.748	38.05	52.55	68.486	43.26	40.548	36.292	47.946	61.045	41.635	0.971	0.954	0.912	0.891	0.962	30.24%	6.17%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021.

2.4.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten.Tanjung Jabung Barat disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah **“Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”**. Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Secara umum Rencana RPPNJP 2005-2025 sebagaimana gambar dibawah ini :



Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Tabel berikut memberikan deskripsi lengkap makna insan cerdas dan Kompetitif :



	Makna Insan Cerdas	Makna Kompetitif
<i>Cerdas spiritual</i>	<ul style="list-style-type: none">Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.	<ul style="list-style-type: none">Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulanBersemerang juang tinggi
<i>Cerdas emosional dan sosial</i>	<ul style="list-style-type: none">Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam, (a) membina dan memupuk hubungan timbale balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.	<ul style="list-style-type: none">JujurMandiriPantang menyerahPembangunan dan pembinaan jejaringBersahabat dengan perubahanInovatif dan menjadi agen perubahanProduktifSadar mutuBerorientasi globalPembelajaran sepanjang hayatMenjadi rahmat bagi semesta alam
<i>Cerdas intelektual</i>	<ul style="list-style-type: none">Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh Kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.	
<i>Cerdas kinestetis</i>	<ul style="list-style-type: none">Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdayatahan, sigap, terampil, dan trengginas.Beraktualisasi insan adiraga.	

(Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019)

Dari Visi Pendidikan Nasional serta mengacu Nawacita, Kemendikbud menetapkan Visi 2019 : “ **Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong** ”, dari Visi tersebut Kemdikbud menetapkan 5 Misi antara Lain :



KODE	MISI
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat
M2	Mewujudkan Akses yang meluas dan Merata
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik

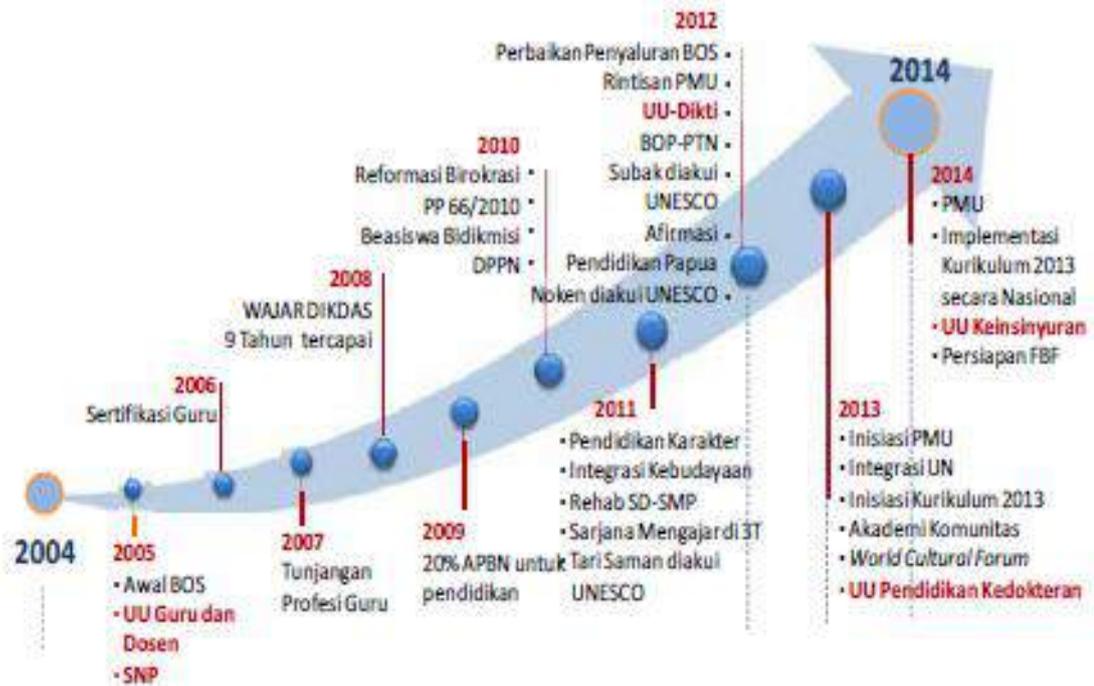
(Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019)

Dari kelima Misi tersebut diatas Kemendikbud menetapkan Tujuan Strategis yang akan dicapai selama 5 Tahun kedepan adalah sebagai berikut :

KODE	Tujuan Strategis
T1	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
T2	Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang bermutu
T3	Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
T4	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat
T5	Peningkatan Mutu pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter
T6	Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
T7	Peningkatan Jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan
T8	Peningkatan sistem tata kelola yang transparans dan akuntabel dengan melibatkan publik

(Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019)

Dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional terkait pembangunan pendidikan, diantaranya ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak serta mempunyai mental dan karakter yang tangguh. Pemerataan pembangunan pendidikan untuk menghilangkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, wilayah khususnya desa, pinggiran, luar jawa dan kawasan timur. Secara umum gambar dibawah ini dapat menggambarkan secara ringkas berbagai tonggak inisiasi dan terobosan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional periode 2006-2014 :



Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan pembangunan serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, kemendikbud menetapkan pembangunan nasional 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi kemendikbud diarahkan untuk mencapai **sasaran pokok/utama** pembangunan pendidikan sebagaimana berikut ini :

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	7, tahun
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1 %
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2 %
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0 %
5	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0 %
6	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90

(Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019)



2.5.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi 2016-2021.

Secara umum Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sejalan dengan Visi Gubernur Jambi 2016-2021 : “ **Jambi Tuntas 2021** ” yaitu : **Tertib, Unggul, Aman, Tangguh, Adil dan Sejahtera**. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan Visi 2016 - 2021 : “ **Mewujudkan Insan Cerdas dan Berdaya Saing** “. Dari Visi yang tersebut diatas telah ditetapkan Misi yang dianggap sejalan dengan NAWACITA serta Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dibawah ini :

NAWACITA	MISI KEMENDIKBUD	MISI PROVINSI JAMBI	JANJI POLITIK GUBERNUR	MISI DISDIK PROV. JAMBI
<p>Nawa Cita 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.</p> <p>Nawa Cita 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.</p> <p>Nawa Cita 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.</p> <p>Nawa Cita 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia</p>	<p>Misi 1 : Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat</p> <p>Misi 2 : Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata</p> <p>Misi 3 : Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.</p> <p>Misi 4 : Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa.</p> <p>Misi 5 : Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.</p>	<p>Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.</p> <p>Misi 4: Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</p>	<p>1.Pemberian tambahan penghasilan non guru sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil.</p> <p>2.Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah.</p> <p>3.Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis.</p> <p>4. Kuliah gratis untuk 15.000 orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/swasta</p>	<p>1.Meningkatkan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu daya saing, dan relevansi serta kepastian dalam pelayanan pendidikan.</p> <p>2. Optimalisasi kapasitas sumber-daya aparatur baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang handal guna tercapainya <i>good governance</i> bidang pendidikan.</p>

Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah menetapkan Isu-isu strategis Bidang Pendidikan :

1. Ketersediaan Layanan Pendidikan
2. Keterjangkauan memperoleh Layanan Pendidikan
3. Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
4. Kesetaraan memperoleh layanan pendidikan
5. Kepastian.



Tantangan yang diusung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi :

1. Menyediakan tenaga pendidik yang professional dan kompeten dengan distribusi yang merata
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata diseluruh Kabupaten/kota
3. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah
4. Mengupayakan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan
5. Mengembangkan dan menerapkan system pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan dan kewirausahaan mengacu pada standar nasional pendidikan
6. Menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal
7. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional dan transparan
8. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan system pendidikan nasional sesuai UU No 20 Tahun 2003.



Dari beberapa keterangan yang telah diberikan pada subbab sebelumnya terdapat beberapa **Permasalahan** yang dapat dijadikan acuan dalam dunia Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.Tanjung Jabung barat sebagai Berikut :

A. BIDANG PENDIDIKAN.

1. Kondisi Geografis Daerah.

Dengan sebaran demografi penduduk yang tinggal di daerah/wilayah yang sulit jangkauan alat transportasi darat, seperti Kecamatan Seberang Kota, Kuala Betara, Senyerang, dan Pengabuan menyebabkan sulitnya jangkauan ketersediaan layanan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal.

2. Pemenuhan Kebutuhan Akses layanan Pendidikan.

Dari data yang ada bahwa masih terdapat sekolah SD/SMP yang belum memiliki kelas yang cukup serta sarana lainnya seperti Ruang perpustakaan yang memadai serta ketersediaan bahan bacaan yang cukup baik, Toilet dg penyediaan air bersih, Ruang Laboratorium IPA yang belum ada beserta alat praktikum yang sesuai dengan kebutuhan Kurikulum. Selain itu untuk kondisi gedung sekolah masih ada yang masih perlu perbaikan terutama gedung sekolah yang berkonstruksi kayu. Untuk meningkatkan kesehatan Jasmani perlu juga pemenuhan terhadap lapangan olahraga beserta perangkat olahraga ataupun halaman yang cukup baik sebagai akses kegiatan ekstrakurikuler, hal ini terutama terdapat pada daerah yang kondisi geografisnya berawa/tanah gambut.

Untuk tingkatan PAUD kondisi yang ada saat ini kondisi sarana dan prasarana juga perlu perhatian lebih sehingga kedepannya dapat memberikan kontribusi maksimal dg kualitas yang lebih baik.



3. Sumber Daya Guru serta sebarannya.

Kualifikasi PTK yang masih belum memenuhi kualifikasi S1 untuk jenjang SD sebesar 26,91%, jenjang SMP sebesar 19,64%, dan persentase Guru pada jenjang SD/SMP yang belum bersertifikasi sebesar 59,08%. Selain itu masih banyak terdapat guru honorer dan sebaran guru yang belum merata sangat membutuhkan perhatian untuk masa yang akan datang.

4. Rendahnya kualitas lulusan

Mutu lulusan sangat berkorelasi salah satunya dengan rata-rata nilai Ujian Nasional dan penyerapan tenaga kerja pasca sekolah. Data menunjukkan, banyak siswa yang nilai Ujian Nasional hanya tipis diatas standar nilai kelulusan dan tidak sedikit pula lulusan yang mengangur karena mereka tidak memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan dunia usaha/industri.

B. BIDANG KEBUDAYAAN.

1. Pengembangan nilai-nilai local yang menunjang pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih terbatas.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana budaya untuk pelestarian dan pengembangan budaya masih minimal.
3. Pengembangan dan pelestarian budaya lokal yang terpadu dengan dunia bisnis masih terbatas.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Kondisi lingkungan strategis nasional yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek sebagai berikut :

1. **Trend Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.**

Angka laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010-2014 terbilang cukup baik. Angka itu didukung oleh perkembangan di berbagai indikator ekonomi makro. Sebagai contoh **MKGI** (*McKinsey Global Institute*) pada tahun 2012 memperkirakan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 dunia pada tahun 2030. Posisi tersebut didapat berdasarkan analisis dan perkiraan atas pertumbuhan beberapa indikator utama seperti pertumbuhan masyarakat kelas menengah keatas dari 45 juta orang menjadi 135 juta orang dan kemampuann 74% usia produktif dalam menyumbang `86% dari PDB. Ini berarti bahwa tahun 2030 Indonesia membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil untuk menjaga kesinambungan kondisi perekonomian. (*Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019*). Meski tren pertumbuhan ekonomi ini mengalami perlambatan pada tahun 2015 akibat berbagai factor pelemahan secara global, telah berdampak pada Indonesia dengan pertumbuhan hanya sebesar 4,8%. Pertumbuhan Indonesia pada tahun 2015 cukup baik untuk negara pengekspor komoditas, tetapi belum cukup untuk menyerap sekitar 3 juta anak muda yang baru masuk



dalam pasar tenaga kerja, juga tidak cukup untuk membalik tren pengentasan kemiskinan yang melambat.

2. Daya Saing Indonesia di Mata Dunia Internasional.

Potensi pertumbuhan ekonomi saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan negara lain. Indonesia mengalami peningkatan dalam daya saing dari 55 pada tahun 2009-2010 menjadi 38 pada tahun 2013-2014. Seluruh indikator GCI (*Global Competitiveness Index*) Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini termasuk pada tahapan dari Negara berkembang menjadi Negara maju.

(Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019)

Aspek daya saing Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari pertumbuhan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang salah satu aspek penilaiannya adalah rata-rata lama bersekolah dan rapan lama sekolah. Berdasarkan perhitungan metode baru IPM, Kabupaten Tanjab Barat memiliki nilai IPM 61,98 pada tahun 2011 meningkat menjadi 65,03 pada tahun 2015. Bila diperhatikan selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu meningkat. Ini berarti pembangunan manusia selama kurun waktu tersebut secara umum mengalami perbaikan yang disebabkan adanya peningkatan pada komponen IPM Berdasarkan metode perhitungan baru nilai IPM, pada tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki nilai IPM 65,03. Angka ini berada dibawah nilai indeks Provinsi Jambi 68,69. Komponen yang berpengaruh adalah pada angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka pertumbuhan IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1,54 lebih tinggi dari Provinsi Jambi sebesar 0,95. Kabupaten Tanjab Barat berada di posisi ke tiga pada tingkat Provinsi Jambi. *(Sumber: BPS Provinsi Jambi 2016).*



3. Perkembangan Demografi.

Secara Nasional Indonesia mempunyai peluang memperoleh bonus demografi yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk nonusia kerja menjadi penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatkan suplay angkatan kerja, peranan perempuan, tabungan dan kualitas manusia. (*Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019*).

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat laju rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 2,27% (2011-2014) (*Sumber : Sensus Ekonomi 2016 Tanjab Barat*) hal ini tentu dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan yang pada intinya aset SDM ini perlu dijaga melalui program pendidikan yang lebih terarah dan terstruktur baik. Hal ini berkaitan dengan aspek bonus demografi yaitu suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

4. Spektrum Tenaga Kerja Indonesia

Sebagai catatan pada tahun 2013, menurut data BPS, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 65,70% hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar (SD/SMP), 24,51% lulusan pendidikan menengah, dan 9,75% lulusan pendidikan tinggi. Pemerintah mempunyai pekerjaan yang sangat besar mengingat tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai catatan, ASEAN telah menerapkan ASEAN *economic community* atau komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, sehingga aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas, sesuai dengan kesepakatan ASEAN.



Peran Indonesia di ASEAN sebagai “pasar terbesar dan basis produksi” paling potensial untuk dikembangkan baik dari faktor sumber daya alam maupun demografi. Kelas menengah yang tumbuh kuat dan kebutuhan akan penguasaan teknologi, menyebabkan Indonesia akan dibanjiri berbagai produk, inovasi, bahkan tenaga kerja asing yang tentunya akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Hal ini memungkinkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. .
(Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019)

5. Kondisi Jati Diri Bangsa

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan bergotong royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal, yang membentuk jati diri bangsa. Namun perkembangan terkini dari kehidupan social masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personal dan komunal. Bahkan sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup.

Peran bahasa dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. (Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019)

Mencermati perkembangan isu strategis dalam bidang pendidikan yang dipaparkan sebelumnya dan dikaitkan dengan TUPOKSI dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka akan dipengaruhi oleh faktor kewenangan baik dari dalam (internal) dan dari factor luar (eksternal) serta berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan pelayanan di bidang pendidikan.

Sejumlah permasalahan dapat diidentifikasi dalam hal pelaksanaan pelayanan bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

- a) Kondisi peralatan, perlengkapan PKBM yang tidak memadai
- b) kondisi sarana prasaran pendidikan sekolah yang tidak memadai



- c) kualifikasi guru s1 dan berkualifikasi/sertifikasi guru yang belum maksimal
- d) ketersediaan layanan pendidikan didaerah yang jauh dari akses transportasi darat serta keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan
- e) keterbatasan ketersediaan anggaran belanja daerah
- f) terbatasnya pengembangan nilai budaya local dalam menunjang pembangunan daerah serta menunjang dunia bisnis
- g) pelestarian warisan budaya belum efektif karena sarana prasarana pendukung belum memadai terbatasnya pengembangan nilai budaya local dalam menunjang pembangunan daerah serta menunjang dunia bisnis

Untuk mengetahui permasalahan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diterangkan melalui Tabel berikut ini :



Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
Tren Pertumbuhan Ekonomi	74% usia produktif dlm menyumbang 86% dari PDB	MKGI (sumber Renstra Kemendikbud)	Pengembangan PKBM yang maksimal	Dinas Perindustrian dan UKM dan Dinas Ketenagkerjaan dlm pembinaan keahlian tamatan SMK yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi peralatan, perlengkapan PKBM yang tidak memadai
Daya saing Internasional	daya saing dari 55 pd tahun 2009-2010 menjadi 38 pd tahun 2013-2014	CGI (sumber Renstra Kemendikbud)	Penyediaan Pengajaran yang berbasis teknologi yang mutakhir serta penyediaan guru yang menguasai teknologi	Kurangnya minat siswa dalam pembelajaran bahasa inggris dan sains	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi sarana maupun prasarana pendidikan sekolah yang tidak memadai baik Kualifikasi guru S1 dan berkualifikasi/sertifikasi guru yang belum maksimal
Perkembangan Demografi	laju rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 2,27% (2011-2014)	BPS	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan RKB Pembangunan USB 	Keterbatasan lahan sekolah yang akan dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Ketersediaan Anggaran melalui APBD II
Kondisi Jati Diri Bangsa	-	Renstra Kemendikbud	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana prasarana pelestarian Budaya Peningkatan Pengembangan sumber daya kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya promosi, diplomasi dan pertukaran budaya Pengaruh budaya luar melalui media informasi yang terbuka luas Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya Pengembangan Nilai Budaya local dalam menunjang pembangunan daerah serta menunjang dunia bisnis Pelestarian warisan budaya belum efektif karena sarana prasarana pendukung belum memadai



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan **Visi** dan **Misi** KabupatenTanjung Jabung Barat adalah :

Visi
***“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil,
Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”***

Dari **Visi** tersebut ditetapkan **4 Misi** sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi masyarakat melalui Agroindustri dan Perikanan.
4. Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari ke 4 Misi kabupaten yang telah ditetapkan tersebut maka prioritas pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTanjung Jabung Barat sesuai dengan amanah tersebut berdasarkan **Misi Kedua** dan **Misi Keempat** maka pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan harus sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Selain itu terdapat faktor Penghambat serta Pendorong yang menjadi acuan dalam pelaksanaan misi tersebut sebagaimana berikut :



Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	<p>Misi ke Dua : "Meningkatkan kualitas hidup Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup"</p> <p>Program untuk mendukung Misi Ke Dua :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Dasar Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pemberian Bantuan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan Beasiswa Bantuan Pendidikan Daerah (BBPD) pada perguruan tinggi negeri/swasta bagi mahasiswa berprestasi 	<p>Kondisi peralatan, perlengkapan pendidikan kejuruan yang tidak memadai</p>	1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	1. Adanya Tupoksi dan struktur organisasi
		<p>- Kondisi peralatan, perlengkapan pendidikan sekolah yang tidak memadai baik sarana maupun prasarana</p>	2. Ketersediaan SDM baik kuantitas serta kualitas yang belum memadai	2. Komitmen SDM untuk mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan kemampuan
		<p>- Kualifikasi guru S1 dan berkualifikasi/sertifikasi guru yang belum maksimal</p>	3. Sebaran PTK yang belum merata	3. Tersedianya SOP, Juklak dan Juknis dalam pelaksanaan kegiatan
		<p>Ketersediaan layanan pendidikan didaerah yang jauh dari akses transportasi darat serta keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan</p>	4. Terbatasnya anggaran yang tersedia	4. Kemajuan teknologi dan informasi dalam pengelolaan DAPODIK serta sistem Manajemen yang berbasis Teknologi
		<p>Keterbatasan Ketersediaan Anggaran melalui APBD II</p>		5. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
				6. Terdapatnya dukungan Dana baik dari APBD I, APBD II dan APBN serta Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2	Misi ke Empat : "Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik" Program untuk mendukung Misi Ke Empat : 1. <i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i> 2. <i>Program Pengelolaan Keberagaman Budaya</i>	Terbatasnya Pengembangan Nilai keragaman dan budaya local dalam menunjang pembangunan daerah serta menunjang dunia bisnis Pelestarian warisan budaya belum efektif karena sarana prasarana pendukung belum memadai	1. Terbatasnya ketersediaanya sarana dan prasarana yang memadai	1. Adanya Tupoksi dan struktur organisasi
			2. Ketersediaan SDM baik kuantitas serta kualitas yang belum memadai	2. Komitmen SDM untuk mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan kemampuan
			4. Terbatasnya anggaran yang tersedia	3. tersedianya SOP, Juklak dan Juknis dalam melaksanakan kegiatan
			5. Belum optimalnya promosi, diplomasi dan pertukaran budaya	4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
			5. Pengaruh budaya luar melalui media informasi yang terbuka luas	5. Terdapatnya dukungan Dana baik dari APBD I, APBD II dan APBN serta Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
			6. Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya Budaya	



3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan pembangunan serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, kemendikbud menetapkan pembangunan nasional 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi kemendikbud diarahkan untuk mencapai *sasaran pokok/utama* pembangunan pendidikan sebagaimana berikut ini :

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8.88 tahun
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1 %
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2 %
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0 %
5	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0 %
6	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90

(Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019)

Jika mengacu pada sasaran pokok sebagaimana tercantum diatas serta dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan Kualitas Insan yang berkeadilan.***

Insan yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pd penduduk miskin dan daerah 3T, serta meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains dan literasi.

2. ***Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh.***

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang antara lain didukung birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien.



3. ***Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah.***

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah diarahkan menjamin pemenuhan pelayanan dasar, termasuk pelayanan pendidikan dan kebudayaan di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat dan mempercepat pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Isu-isu strategis pendidikan di Provinsi Jambi untuk lima tahun mendatang sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi ; (1) ketersediaan fasilitas layanan pendidikan (2) keterjangkauan layanan pendidikan, (3) mutu dan relevansi pendidikan masih harus terus ditingkatkan, (4) kesetaraan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan serta, (5) kepastian dalam mendapatkan layanan pendidikan.

Secara umum Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengacu pada Sasaran Pokok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dibawah ini dapat digambarkan secara Implisit komparasi antara sasaran Kemdikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi dengan kondisi serta permasalahan Pendidikan KabupatenTanjung Jabung Barat seperti tabel berikut ini :



Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran
Renstra Kementerian dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Sasaran Pokok jangka Menengah Renstra Kementerian dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jambi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Ketersediaan pelayanan pada daerah terpencil yg jauh jangkauan transportasi darat, terutama pada daerah pasang surut	Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan masih rendah ditambah kondisi perekonomian yg masih digaris kemiskinan	Keterlibatan instansi yg berkaitan dengan Ke-PU an dalam membuka akses transportasi. Penyediaan beasiswa miskin melalui KIP dari Kementerian dan Dana CSR
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	Peningkatan KB (kelompok Belajar)	Keterbatasan ketersediaan Dana melalui APBD II dlm mendorong bergeraknya KB	Mendorong perpustakaan keliling disetiap Kecamatan
3	Persentase SD/MI berakreditasi	Kondisi sarana dan prasarana pendukung serta Ketersediaan Tenaga PTK besertifikasi	Keterbatasan ketersediaan Dana melalui APBD II	Terbukanya peluang memanfaatkan dana yg bersumber dari DAK dan BAPEM (APBN) serta CSR. Adanya Program Pelatihan Bagi Tenaga PTK
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi	Kondisi sarana dan prasarana pendukung serta Ketersediaan Tenaga PTK besertifikasi	Keterbatasan ketersediaan Dana melalui APBD II	Terbukanya peluang memanfaatkan dana yg bersumber dari DAK dan BAPEM (APBN) serta CSR. Adanya Program Pelatihan Bagi Tenaga PTK



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Subbab mengenai kondisi RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta telaahan mengenai kondisi sebenarnya/excisting yang ada, maka disini dapat kita ambil kesimpulan dan perkiraan pengembangan pelayanan SKPD untuk masa yang akan datang serta factor penghambat dan pendorong agar Rencana pengembangan pelayanan pendidikan lebih focus pada hal-hal yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kemaslahatan masyarakat Tanjung Jabung Barat.



Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah		Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2		3	4	5
1	Kuala Tungkal sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dengan Indikasi Program :				
	- Perwujudan Kawasan Perikanan	Memberikan peluang terbukanya SMP/PKBM yg mendukung sentra industry perikanan dan hasil laut	Perubahan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, Ketersediaan Tenaga PTK, Belum Maksimalnya Sarana dan Prasarana SMK yg ada	- Masih Kurangnya minat dan Pemahaman orang tua/siswa dlm menempuh pendidikan kejuruan - Kurangnya pelatihan lanjutan bagi alumni siswa SMK yg lebih professional - Tidak tersedianya Industri hilir yg Modern untuk menampung para Alumni SMK Perikanan	- Tersedianya PAUD, Pendidikan Dasar SD/SMP sebagai penyokong siswa untuk melanjutkan ke tingkat Menengah SMA/SMK - Terbukanya peluang usaha yg sangat besar dibidang Kelautan/Maritim - Arah Pembangunan Nasional untuk Kemaritiman menjadi Prioritas Utama Pembangunan - Terdapat SMK Kelautan (SMKN 2 Kuala Tungkal)
	- Perwujudan kawasan Industri	Memberikan peluang pengembangan SMP/PKBM yg mendukung sentra industry kecil, menengah dan besar	Perubahan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, Ketersediaan Tenaga PTK, Belum Maksimalnya fungsi PKBM	Kurangnya pelatihan lanjutan bagi alumni siswa SMK yg lebih profesional	Tersedianya PAUD, Pendidikan Dasar SD/SMP sebagai penyokong siswa untuk melanjutkan ke tingkat Menengah SMA/SMK



	- Kawasan Peruntukan Pariwisata	Memberikan peluang pengembangan SMK/PKBM yg mendukung sentra industry pariwisata lokal	- Perubahan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, - Ketersediaan Tenaga PTK	- Kurangnya pelatihan lanjutan bagi alumni siswa SMK yg lebih professional - Masih kurangnya promosi daerah untuk meningkatkan pariwisata local melalui Kesenian dan Budaya Lokal	- Tersedianya PAUD, Pendidikan Dasar SD/SMP sebagai penyokong siswa untuk melanjutkan ke tingkat Menengah SMA/SMK. - Terdapat Kelompok Seni Budaya yg perlu dikormersilkan - Terdapatnya Wisata Religi yg dijadikan Event Tahunan
	- Kawasan Peruntukan Permukiman	Akan memberikan dampak pertumbuhan jumlah Siswa serta kebutuhan Ruang Belajar yg diakibatkan pengaruh Urbanisasi.	Ketersediaan sarana dan prasarana	Kondisi sarana dan prasarana pendukung serta Ketersediaan Tenaga PTK besertifikasi. Keterbatasan luas lahan yg dimiliki untuk mengembangkan sekolah	Terbukanya peluang memanfaatkan dana yg bersumber dari DAK dan BAPEM (APBN) serta CSR. Adanya Program Pelatihan Bagi Tenaga PTK
4	Serdang Jaya sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal) dengan Indikasi Program :				
	- Kawasan Peruntukan Permukiman	Akan memberikan dampak pertumbuhan jumlah Siswa serta kebutuhan Ruang Belajar yg diakibatkan pengaruh Urbanisasi.	Ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM Tenaga PTK	-Kondisi sarana dan prasarana pendukung serta Ketersediaan Tenaga PTK besertifikasi	Terbukanya peluang memanfaatkan dana yg bersumber dari DAK dan BAPEM (APBN) serta CSR. Adanya Program Pelatihan Bagi Tenaga PTK



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan hasil review pada subbab sebelumnya ada beberapa factor yang mempengaruhi untuk menentukan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yakni :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4. Implikasi dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) bagi Pelayanan Perangkat Daerah
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas haruslah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Setelah kita tentukan permasalahan sebagaimana tersebut diatas barulah kita dapat menyimpulkan isu-isu strategis yang akan kita tentukan kemudian. Kalau kita tinjau lebih jauh penentuan Isu-isu Strategis ialah dengan memberikan penilaian sesuai dengan criteria permasalahan yang kita tinjau. Sebagai dasar dibawah ini ditampilkan Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis :

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki Pengaruh yang besar terhadap pencapaian Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan	20
2	Merupakan Tugas dan Tanggung jawab SKPD	10
3	Menimbulkan Dampak positif terhadap Masyarakat	20
4	Memiliki Pengaruh terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah	10
5	Kemungkinan atau Kemudahan untuk ditangani	15
6	Prioritas Janji politik Kepala Daerah terpilih	25
	Total	100

Selanjutnya kita menentukan beberapa Isu-Isu strategis yang kita simpulkan dari subbab sebelumnya untuk diberikan pembobotan/Penilaian.

Dinas Pendidikan mengambil kesimpulan *isu-isu strategis* yang perlu diambil sebagai acuan sebagaimana berikut ini :



No.	ISU-ISU STRATEGIS
1	SDM pada Dinas Pendidikan yang mengelola tugas dan fungsi sebagai tenaga PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) perlu ditingkatkan profesionalitas dan kompetensi dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan
2	Perlunya Ketersediaan pelayanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Dasar berkualitas yang merata
3	Distribusi tenaga pendidik profesional dan kompeten yang kurang merata
4	Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah
5	Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional dan transparan
6	Budaya serta Kearifan Lokal masih terbatas digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan objek dunia usaha



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Adapun **Tujuan Strategis (TS)** Dinas Pendidikan Kabupaten.Tanjung Jabung Barat 2016-2021 :

Kode	Tujuan Strategis (TS)
T1	Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Dasar
T2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter
T3	Peningkatan Pengembangan Kelestarian Nilai dan Keragaman Serta Kelembagaan Kebudayaan.
T4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi

Penjelasan mengenai tujuan dari masing-masing tujuan strategis sebagai berikut ini :

1. **Tujuan Strategis 1 (T1): Peningkatan Akses Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Dasar**

Peningkatan akses pendidikan telah dilakukan selama ini baik itu pembangunan kelas baru, USB (Unit Sekolah Baru) maupun pembangunan kelas jauh yang merupakan cikal bakal berdirinya sekolah baru. Hal tersebut dapat dilihat dari data pada BAB II sebelumnya tentang capaian kinerja. Selain itu mencakup juga terhadap jaminan bagi lulusan TK, SD, SMP untuk



melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi baik itu SMA/SMK. Peningkatan akses layanan ini juga mencakup peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus serta pelatihan bagi org dewasa/keluarga.

2. **Tujuan Strategis 2 (T2) : Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter.**

Peningkatan mutu pembelajaran mencakup hal yang berhubungan dengan peningkatan penerapan kurikulum secara baik bagi peserta didik oleh tenaga pendidik. Hal ini tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki oleh pendidik dalam hal ini guru serta pengawas sekolah dalam memahami serta menerapkan kurikulum dimaksud, juga pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan ketrampilan tepat guna bagi usia penduduk 15-59 tahun. Peningkatan mutu lembaga kursus serta pelatihan sangat diperlukan untuk menjamin mutu peserta pelatihan atau kursus dapat diterima di pasar kerja. Bahkan dapat memotivasi bangkitnya pengusaha muda baru.

3. **Tujuan Strategis 3 (T3): Peningkatan Pengembangan Kelestarian Nilai dan Keragaman Serta Kelembagaan Kebudayaan.**

Pembangunan kebudayaan yang mengutamakan kearifan local dikembangkan dan ditata sedemikian rupa dalam dunia pendidikan formal dalam wujud mata pelajaran muatan local, serta pendidikan masyarakat melalui kelompok/grup seni budaya yang telah lama berkembang. Pengembangan pelestarian dan nilai keragaman kebudayaan dengan menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui pengembangan karakter jati diri saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong serta meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya daerah. Pelestarian nilai dan keragaman budaya dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan.



4. **Tujuan Strategis 4 (T4) : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam tata kelola organisasi menjadi factor penting dalam penyelenggaraan pelayanan organisasi agar efektif dan efisien. Penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat daerah; Peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan birokrasi merupakan salah satu agenda utama proses Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di Kemendikbud yang juga menjadi acuan organisasi pelaksana urusan pendidikan di tingkat pemerintah daerah.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis (TS)** pembangunan pendidikan dan kebudayaan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis (SS)** yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis (SS)** dapat mengkonfirmasi **Tujuan Strategis (TS)** yang akan dicapai pada masa mendatang (2021).

Sasaran Strategis (SS) untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan Strategis 1 (T1): Peningkatan Akses Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat,** dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut :



Tabel 4.1. Tujuan Strategis 1 (T.1)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka melek aksara penduduk usia dewasa diatas 15 tahun sekurang-kurangnya 98.70%
		Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun
SS2	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SD/MI
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

2. **Tujuan Strategis 2 (T2) : Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter**, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Tabel 4.2. Tujuan Strategis 2 (T.2)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS3	Meningkatkan Profesionalisme dan distribusi Guru Serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi) 91.73 %

3. **Tujuan Strategis 3 (T3) : Peningkatan Pengembangan Kelestarian Nilai dan Keragaman Serta Kelembagaan Kebudayaan**, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:



Tabel 4.3. Tujuan Strategis 3 (T.3)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas
		Jumlah Hasil karya Individu yang memiliki HAKI

4. Tujuan Strategis 4 (T4) : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi

Tabel 4.4. Tujuan Strategis 4 (T.4)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik , Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Skor LAKIP minimal sebesar 70
		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sebesar 77
		Jumlah Masyarakat Lulusan Perguruan Tinggi 1500 orang

Secara Implisit dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan yang lebih rinci mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD dihitung/Estimasi dan direncanakan pertahun sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel T-C. 25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	4	5	6	
SS1 Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan	IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk Usia 15 - 59 th	$= \frac{\text{Banyaknya Penduduk Usia 15 - 59 th yang melek huruf}}{\text{Banyaknya Penduduk Usia 15 - 59 th}} \times 100 \%$	DUKCAPIL	KABID PAUD
	IKSS1.2	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{k=1}^{k_{max}} (Lama\ sekolah\ penduduk\ ke - 0)$ <p>dengan:</p> <p>P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-1</p> <p>a. Tidak pernah sekolah = 0</p> <p>b. Mulai sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelan terakhir - 1</p> <p>c. Mulai sekolah di SD/SL = konversi ijazah terakhir + 1</p> <p>d. Tidak bersekolah lagi atau tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</p> <p>e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelan terakhir - 1</p>	BPS	KABID DIKDas
SS2 Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKSS2.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$= \frac{\text{Jumlah Peserta Lulus Ujian Jenjang SD/MI}}{\text{jumlah Peserta Ujian pada jenjang SD/MI pada tahun berjalan}} \times 100 \%$	DAPODIK	KABID DIKDas
	IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$= \frac{\text{Jumlah Peserta Lulusan pada Jenjang SMP/MTs}}{\text{jumlah Peserta Ujian pada jenjang SMP/MTs Tahun berjalan}} \times 100 \%$	DAPODIK	KABID DIKDas
	IKSS2.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$= \frac{\text{Jumlah Siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	DAPODIK	KABID DIKDas
SS3 Meningkatkan Profesionalisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	IKSS3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	$= \frac{\text{Jumlah Guru yang telah memiliki sertifikat Pendidik}}{\text{jumlah Guru Keseluruhan}} \times 100 \%$	DAPODIK	KABID GTK
SS4 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi	IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	$= \frac{\text{Jumlah Lembaga Adat yang telah memiliki Legalitas}}{\text{Jumlah Lembaga Adat Keseluruhan}} \times 100 \%$		KABID KEBUDAYAAN
	IKSS4.2	Jumlah Hasil karya Individu yang memiliki HAKI	Jumlah Hasil Karya Individu yang telah memiliki HAKI		KABID KEBUDAYAAN



Tabel T-C. 25

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat	SS1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk usia dewasa Usia 15 - 59 th	98,41%	98,46%	98,50%	98,50%	98,60%	98,70%
				IKSS1.2	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	7,58 tahun	7,65 tahun	7,73 tahun	7,80 tahun	7,87 tahun	7,95 tahun
2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS2	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKSS2.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97.92%	98.41%	98.90%	99.40%	99.89%	100%
				IKSS2.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	93.38%	94.78%	96.20%	97.65%	99.11%	100%
				IKSS2.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	87.87%	88.75%	89.64%	90.53%	91.44%	92.35%
		SS3	Meningkatkan Profesionalisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	IKSS3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	81,23%	87,89%	94,73%	95%	99,23%	100%
3	Peningkatan Kualitas Tatanan Masyarakat dalam beragama dan berbudaya	SS4	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah	IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	2%	2.20%	2.42%	2.66%	2.93%	3.00%
				IKSS4.2	Jumlah Hasil Karya Individu yang telah memiliki HAKI	0	2 Karya	1 Karya	1 Karya	1 Karya	5 Karya
4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi	SS5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, AKIP dan Keuangan	IKSS5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65	66	67	68	69	70
				IKSS5.2	Nilai AKIP	61	65	68	70	73	75
				IKSS5.3	Pelaporan Keuangan Sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				IKSS6.1	Jumlah Masyarakat Lulusan Perguruan Tinggi	0	0	20	35	48	64



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan.

Dari penjelasan *Tujuan Strategis (TS)* dan *Sasaran Strategis (SS)* pada Subbab diatas dapat disimpulkan beberapa komponen yang dijadikan acuan dalam menentukan Strategi Umum :

Tabel 5.1. Komponen dan Strategi Umum

No	Komponen	Strategi Umum
1	2	3
1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan berkompeten secara merata 2. Meningkatkan mutu pendidik dan kependidikan melalui sertifikasi profesi
2	Sarana dan Prasarana	3. Penyediaan dan Peningkatan sarana prasarana bermutu pada semua tingkatan pendidikan secara merata
3	Proses Pembelajaran dan penilaian	4. Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan SNP (stándar nasional pendidikan) 5. Penyediaan data dan informasi pendidikan serta akreditasi pendidikan yang handal
4	Budaya	6. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Budaya.
5	Pendanaan	7. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal informal

Selanjutnya dari beberapa komponen yang dijadikan sasaran strategi umum dapat ditarik hubungan dengan Arah Kebijakan sebagaimana dalam tabel berikut ini :



Table 4.2 Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

TABEL T- C.26							
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021							
VISI (RPJMD)		: Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur Bermartabat dan Berkualitas					
MISI II (RPJMD)		: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1		2		3		4	
T1	Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat	SS1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	1.1	Penyediaan sarana dan Prasarana pada semua tingkatan pendidikan secara merata.	1.1.1	Membangun dan merehabilitasi sarana prasarana penunjang pendidikan.
				1.2	Pengawasan yg lebih ketat dan akuntabel dalam penggunaan anggaran pendidikan yg bersumber dana BOS, KIP dan lainnya sehingga tepat sasaran.	1.2.1	Mendorong pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan pendidikan.
						1.2.2	Membangun koordinasi yg lebih aktif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam mendorong pembangunan pendidikan di Kab.Tanjung Jabung Barat.
T2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS2	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	2.1	Penyediaan sarana dan Prasarana yg bermutu pada semua tingkatan pendidikan secara merata.	2.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana bermutu penunjang pendidikan yg lebih merata.
						2.1.2	Menerapkan kurikulum belajar sesuai dengan standar nasional
				2.2	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan berkompeten/professional secara merata.	2.2.1	Kualifikasi dan Sertifikasi
						2.2.2	Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan
						2.3	Penyediaan system pembelajaran sesuai dengan SNP (Standar Nasional Pendidikan)
2.3.2	Mendorong peningkatan akreditasi sekolah						



MISI II (RPJMD) :		Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1		2		3		4	
T2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS3	Meningkatkan Profesionallisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	3.1	Meningkatkan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui sertifikasi profesi	3.1.1	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat teknis
						3.1.2	Meningkatkan mutu pendidik melalui pendidikan terstruktur dan berkualitas
				3.2	Penyediaan data dan informasi pendidikan	3.2.1	Validasi Data Pokok Pendidikan
						3.2.2	Penyediaan subsidi bagi Pendidik dan tenaga kependidikan



MISI IV (RPJMD) :		Meningkatkan persatuan dan kesatuan Daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintah yang baik					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1		2		3		4	
T3	Peningkatan Kualitas Tatanan Masyarakat dalam beragama dan berbudaya	SS4	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah	4.1	Meningkatkan Peran masyarakat dalam pelestarian dan keragaman Budaya	4.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan seni budaya yg memadai
						4.1.2	Mengali kebudayaan local untuk dikembangkan lagi
				4.2	Peningkatan Khasanah Budaya Daerah	4.2.1	Peningkatan penerapan mata pelajaran muatan local disekolah
						4.2.2	Penyediaan sarana dan prasana kegiatan seni budaya.
T4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi	SS5	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh bidang;	5.1.1	Penyempurnaan sistem manajemen dan akuntabilitas pelaporan kinerja Dinas DIKBUD secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik
				5.2	Penguatan pengawasan terhadap kinerja bidang dan subbidang	5.2.1	Evaluasi rutin
				5.3	Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;	5.3.1	Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Penetapan Strategi Umum dan Arah kebijakan yg telah ditampilkan pada Bab sebelumnya maka selanjutnya dapat dijabarkan melalui program dan Kegiatan periode 2016—2021. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2016—2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru yang *berbasis pada kinerja* sesuai dengan Renstra Kemendikbud tahun 2015-2019. Pada tabel 6.1 dibawah ini dapat dilihat *Struktur program dan unit eselon III yang bertanggung jawab* untuk mengelola program Perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 6.1
Struktur Program Dinas Pendidikan

No	Program	Penanggung Jawab
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat/Bidang
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Sekretariat
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sekretariat
5	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sekretariat
6	Pemberian beasiswa Daerah	Sekretariat
7	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Bidang PAUD dan Dikmas
8	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Bidang Pendidikan Dasar
9	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
10	Pengembangan Nilai Budaya	Bidang Budaya
11	Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Bidang Budaya

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan yg dijabarkan menurut Program dengan disertai Pendanaan Indikatif ditampilkan dalam tabel dibawah ini :



Selanjutnya penjelasan lebih rinci **Pendanaan Indikatif Kegiatan** untuk ke 11 Program diatas dijabarkan pada Tabel sebagaimana **Lampiran 1. Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.**

TABEL T- C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

(Dalam Juta)

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, AKIP dan Keuangan	12 bulan	12 bulan	3,462	12 bulan	3,650	12 bulan	3,967	12 bulan	4,314	12 bulan	4,696	12 bulan	5,114	12 bulan	25,202.86	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase waktu pelayanan surat masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP	100%	100%	133	100%	147	100%	162	100%	178	100%	195	100%	215	100%	1,029.92	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase jasa komunikasi yang dapat dibayarkan sesuai peraturan	100%	100%	402	100%	442	100%	486	100%	535	100%	588	100%	647	100%	3,100.31	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pelaporan keuangan sesuai SAP (Standar Akutansi Pemerintah)	100%	100%	372	100%	410	100%	451	100%	496	100%	545	100%	600	100%	2,873.02	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa Kebersihan Kantor yang dapat dibayarkan sesuai peraturan	12 bulan	12 bulan	98	12 bulan	108	12 bulan	118	12 bulan	130	12 bulan	143	12 bulan	158	12 bulan	755.40	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ATK yang dapat disediakan	100%	100%	932	100%	1,025	100%	1,128	100%	1,240	100%	1,364	12 bulan	1,501	100%	7,190.01	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang dapat disediakan	12 bulan	12 bulan	449	12 bulan	493	12 bulan	543	12 bulan	597	12 bulan	657	12 bulan	722	12 bulan	3,461.18	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dapat disediakan	12 bulan	12 bulan	20	12 bulan	22	12 bulan	24	12 bulan	26	12 bulan	29	12 bulan	32	12 bulan	152.59	Dikbud	Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target			Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	112	12 bulan	123	12 bulan	136	12 bulan	149	12 bulan	164	12 bulan	181	12 bulan	865.69	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
		Penyediaan Makan dan Minum	Persentase kordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100%	100%	252	100%	277	100%	305	100%	335	100%	369	100%	406	100%	1,944.80	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase layanan koordinasi bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	100%	100%	692	100%	603	100%	615	100%	627	100%	640	100%	653	100%	3,829.94	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung kantor	02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas bangunan gedung kantor dan peralatan gedung kantor serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor			100%	1,154	100%	852	100%	991	100%	1,097	100%	1,244	100%	1,247	100%	6,586	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang disediakan	0	1	380	-	-	3	54	3	66	5	110	-	610	Dikbud	Tanjung Jabung Barat		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Gedung kantor yang dapat dipelihara dengan baik	100%	100%	384	100%	423	100%	465	100%	512	100%	563	100%	619	100%	2,966	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara dengan baik	100%	100%	71	100%	78	100%	86	100%	94	100%	104	100%	114	100%	547	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara dengan baik	100%	100%	272	53	299	53	329	53	362	53	398	53	438	53	2,099	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor dipelihara dengan baik	100%	100%	47	100%	52	100%	57	100%	63	100%	69	100%	76	100%	364	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
			Peningkatan nelayanan	03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan kedinasan			100%	656	100%	721	100%	793	100%	873	100%	960	100%	1,056	100%	5,058

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	aparat	Penyediaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	93stel	93stel	656	145 stel	721	170 stel	793	180 stel	873	200 stel	960	220	1,056	220	5,058	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
	Meningkatnya Laporan AKIP	04. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, AKIP dan Keuangan	12 bulan	12 bulan	60	12 bulan	62	12 bulan	63	12 bulan	65	12 bulan	67	12 bulan	69	12 bulan	386	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen LKJ (LAKIP,LPPK,LPPD, Evaluasi renja dan renstra)	5 dok	5 dok	60	5 dok	62	5 dok	88	5 dok	97	5 dok	106	12 bulan	117	12 bulan	530	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		5. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN	Peningkatan Akses Manajemen Pelayanan Pendidikan	11.02%	19.18%	390	27.35%	517	35.51%	992	43.67%	1,091	51.84%	826	60.00%	909	1		Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Operasioanal Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah SD dan SMP	Terlaksananaya Operasioanal Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah	0	0	240	40	245	40	309	40	340							Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pengelolaan Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen RENJA(Ranwal,Rancangan akhir dan renja yang dikirimkan tepat waktu)	100%	100%	150	100	153	100	135	100	149	100	163	100	180	100		Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Dana Operasional Manajemen BOS	Persentase laporan Dana Bos yang akuntabel dikirim tepat waktu	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%	5,522.96	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Operasional Tim Pengelolaan dan Pendataan Aset	Persentase Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan status penggunaanya.	55.00%	55.00%		60.00%	76	65.00%	85	65.00%	94	70.00%	103	95.00%	113	100%	470	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Data dan informasi pendidikan vallid	100%	100%		1 kegiatan	43	1 data	99	1 data	109	1 data	120	1 data	132	1 data		Dikbud	Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Rapat Koordinasi PAUD	Jumlah Lembaga Paud yang dikordinasikan	0	0	0	-	-	280(lem aga)	164	280(lem aga)	180	280(lem aga)	198	280(lem aga)	218	280(lem aga)		Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
		6. PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA DAERAH	Meningkatnya Kualitas SDM Tanjung Jabung Barat	0	-	-	-	-	16 org	1,000	35 org	2,000	48 org	3,000	64 org	4,000	64 org		Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
		Pemberian Beasiswa Daerah	Jumlah Penerima Beasiswa	0	0	-	0	-	16 org	1,000	35 org	2,000	48 org	3,000	64 org	4,000	64 org		Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
	SS.1 Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan	07. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	Terciptanya Kemerataan Akses PAUD dan DIKMAS di Semua Kecamatan	72.46%	72.46%	2,654	73.46%	2,904	74.50%	5,091	75.50%	5,593	76.60%	6,345	77.75%	6,972	77.75%	27,755	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga Paud yang mendapatkan insentif	198(lem aga)	199(lem aga)	2,235	199(lem aga)	2,197	280(lem aga)	3,560	280(lem aga)	3,916	280(lem aga)	4,308	280(lem aga)	4,738	280(lem aga)	20,954	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
		Pelatihan Tutor PAUD	Jumlah PTK (Tutor PAUD) yang dilatih.	-	-	-	-	-	712 Orang	277	712 Orang	305	712 Orang	335	712 Orang	369	712 Orang	1,286	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
		Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Persentase Kurikulum PAUD yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	200.-	100%	220	100%	220	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
		Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C berbasis komputer	Jumlah Remaja/ Orang Usia Dewasa yang Lulus kualifikasi setara SD/ Paket A SMP/ Paket B SMA/ Paket C	176	867	82	880	83	100%	89	100%	91	100%	93	100%	94	100%	532	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
		Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah lembaga PKBM yang dibina per tahun	0	30(kelomp ok)	261	30(kelom pok)	261	45(kelom pok)	234	45(kelom pok)	257	45(kelom pok)	283	45(kelom pok)	311	45(kelom pok)	1,608	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat																					

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Masyarakat		Kegiatan Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan	Jumlah Angkatan kerja muda yang mempunyai kecakapan kerja Tata rias pengantin sebanyak 150 Orang				150(org)	102	150(org)	137	150(org)	151	150(org)	166	150(org)	182	150(org)	737	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Penyediaan Dana Alokasi Khusus Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Kesetaraan	Persentase laporan BOP PAUD yang akuntabel dikirim tepat waktu	-	2809lembaga)	76	2809lembaga)	261	2809lembaga)	273	2809lembaga)	300	2809lembaga)	330	2809lembaga)	363	2809lembaga)		Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Operasional Rumah Bahasa	Jumlah Masyarakat yang terbina dalam penggunaan Bahasa Asing - Bahasa Arab - Bahasa Inggris - Bahasa Jepang - Tahfidz Quran					190(org)	521	190(org)	573	190(org)	630	190(org)	693	190(org)	2,418	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
		08. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN	Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang berkualitas		100%	6,150	100%	14,328	100%	16,064	100%	18,616	100%	20,383	100%	22,421	100%	93,821	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Dana Operasional Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah	Persentase Sekolah yang berakreditasi B (SD dan SMP)	0	19,18%	140	27,35%	154	35,31%	169.4	43,67%	186.34	51,84%	205	60%	225	60%	1,080	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Ujian Nasional dan UASBN PAI SMP/MTs Negeri dan Swasta	jumlah anak didik peserta Ujian Nasional tingkat nasional	4785(Peserta)	4997(Peserta)	209	5019 (Peserta)	294	5019 (Peserta)	323	5019 (Peserta)	356	5019 (Peserta)	391	5019 (Peserta)	430	5019 (Peserta)	2,003.55	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Ujian Sekolah SD / MI dan UASBN PAI	jumlah anak didik peserta ujian sekolah SD/MI dan UASBN PAI	5979 (Peserta)	6229 (Peserta)	694	6150 (Peserta)	755	6211 (Peserta)	793	6273 (Peserta)	872	6336 (Peserta)	959	6400 (Peserta)	1,055	6400 (Peserta)	5,127.74	Dikbud	Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Pendampingan Profesional dan Pemantapan Kurikulum Sekolah Dasar	jumlah Sekolah pendampingan profesional dan pemantapan kurikulum SD	0	213 sekolah	477	213 sekolah	486	213 sekolah	476	213 sekolah	524	213 sekolah	576	213 sekolah	634	213 sekolah	3,171.80	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pendampingan Profesional dan Pemantapan Kurikulum SMP	jumlah peserta pendampingan profesional dan pemantapan kurikulum SMP		62	172	20 Sekolah/160 peserta	170	66	172	67	189	68	208	69	229	69	1,139.96	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD	jumlah peserta O2SN Tingkat SD	12 org	12 org	39	12 org	42	12 org	47	16 org	51					-		Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	jumlah peserta O2SN Tingkat SMP	38	49	39	45(orang)	31	45(orang)	34	45(orang)	38							Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD	jumlah Peserta Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD	79 org	79 org	63	79 org		79 org	64	79 org	70	78 org	74	78 org	81	78 org	352.78	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP	jumlah Peserta Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP	60(sekolah)	60(sekolah)	96	60(sekolah)	95	60(sekolah)	102	60(sekolah)	112					-		Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP	Jumlah Peserta OSN SMP	60(sekolah)	60(sekolah)	96	60(sekolah)	105.60	60(sekolah)	116.16	60(sekolah)	127.78	60(sekolah)	140.55	60(sekolah)	154.61	60(sekolah)	740.70	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SD (FLS2N SD)	jumlah peserta FLS2N Tingkat SD	78 org	78 org	76	78 org	84	78 org	125	78 org	138					-			
		Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SD (FLS2N SD) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD	Jumlah Peserta FLS2N dan O2SN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 org	212	100 org	233	100 org	233	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
	SS.2 Meningkatkan mutu layanan dan lulusan Pendidikan	Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMP (FLS2N SMP)	jumlah peserta FLS2N Tingkat SMP	25	29	52	42(orang)	36	42(orang)	154	42(orang)	169							Dikbud	Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target			Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada	1. Pendidikan dasar dan menengah	Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMP (FLS2N SMP) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah Peserta FLS2N dan O2SN	50 Orang	50 orang	-	87 orang	-	87 orang	-	87 orang	-	87 orang	255	87 orang	280.50	87 orang	535.50	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Gala Siswa Indonesia	Jumlah Peserta GSI	912	912	334	912	334	912	367	913	404	912	444	912	488	912		Dikbud	Tanjung
		Pembangunan Rumah Dinas Jabatan guru/kepala sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru yg dibangun	0	0	-	2 Sekolah	546	6 Sekolah	1,638	6 Sekolah	1,802	6 Sekolah	1,982	6 Sekolah	2,180	6 Sekolah	8,147.96	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pengadaan Mebelaur Sekolah	Jumlah meubeleur yang disediakan	0	0	-	-	-	12 Paket	535	30 Paket	1,285	30 Paket	1,414	30 Paket	1,555	30 Paket	4,788.35	Dikbud	Tanjung Jabung
		Pembangunan Gedung Kantor	jumlah pagar dan halaman sekolah yg dibangun	0			6 Sekolah	1,061	10 Sekolah	1,800	10 Sekolah	1,980	10 Sekolah	2,178	10 Sekolah	2,396	10 Sekolah	9,414.80	Dikbud	Tanjung Jabung
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah Ruang kelas SD dan SMP yg direhabilitasi sedang/berat/total		20 Sekolah	2,000	3 Sekolah	722	5 Sekolah	2,500	8 Sekolah	3,000	8 Sekolah	3,300	8 Sekolah	3,630	8 Sekolah	15,152.00	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang dilakukan Pembinaan menuju LSS Propinsi	3 sekolah	3 sekolah	161	3 sekolah	161	3 sekolah	177	3 sekolah	195	3 sekolah	214	3 sekolah	236	3 sekolah	1,143.92	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah	jumlah Perpustakaan yg dibangun	0	0	-	-	-	5 Sekolah	1,280	5 Sekolah	1,408	5 Sekolah	1,549	5 Sekolah	1,704	5 Sekolah	5,940.48	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Penambahan Ruang Kelas Baru SD dan SMP	Jumlah Ruang kelas SD dan SMP yg dibangun		2 Sekolah	420	5 Sekolah	3,314	5 Sekolah	3,645	5 Sekolah	4,010	5 Sekolah	4,411	5 Sekolah	4,852	5 Sekolah	20,652.30	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
	Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan	Persentase Laporan DAK fisik Akuntabel	100%	100%	1,225	100%	5,789	100%	1,482	100%	1,630	100%	1,793	100%	1,973	100%	13,892.39	Dikbud	Tanjung Jabung	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pembentukan Karakter		Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD dan SMP	Jumlah Sekolah yang mendapat sosialisasi	0	0	-	-	-	100%	58	100%	64	100%	70	100%	77	100%	269.18	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Kerjasama Bidang Pendidikan Sistem Tata Kelola Sarana Prasarana Bidang SD	Operasional TAKOLA Pendidikan Sekolah Dasar	0	0	-	215 sekolah	153	54 sekolah	49	53 sekolah	54	53 sekolah	59	54 sekolah	65	54 sekolah	380.41	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Kerjasama Bidang Pendidikan Sistem Tata Kelola Sarana Prasarana Bidang SMP	Operasional TAKOLA Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	0	-	66 sekolah	61	20 sekolah	46	15 sekolah	51	15 sekolah	56	15 sekolah	61	15 sekolah	274.49	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pendampingan Propesional Sekolah Model SD dan SMP	Jumlah sekolah model	0	0	-	20 sekolah	88	16 sekolah	80	16 sekolah	88	16 sekolah	97	16 sekolah	106	16 sekolah	459.28	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		09. Program Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	Peningkatan mutu, kompetensi, karir, Perlindungan serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)		30%	11,673	35%	7,356	40%	8,262	45%	9,088	50%	1,912	55%	2,081	100.0%	40,371.69	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru	Jumlah Penerima Aneka tunjangan	100%	100%	96	100%	98	100%	101	100%	111	100%	122	100%	134	100%	662.60	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pelaksanaan ujian posttest berbasis SIM PKB	jumlah peserta UKG Online	3700	100%	20	100%	20	100%	120	100%	132	100%	145	100%	160	100%	596.36	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Kelas Tinggi (SD Berbasis SIM	jumlah peserta Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Kelas Tinggi (SD	120(org)	120(org)	126	120(org)	128	60 (org)	69	60 (org)	76	60 (org)	83	60 (org)	92	60 (org)	574.39	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Diklat Peningkatan Guru Kelas Rendah (SD Berbasis SIM PKB)	jumlah peserta Diklat Peningkatan Guru Kelas Rendah (SD Berbasis SIM PKB)	120(org)	120(org)	132	120(org)	134	120(org)	137	120(org)	151	120(org)	166	120(org)	182	120(org)	901.13	Dikbud	Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SS.3 Meningkatkan Profesionalisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	Diklat Berbasis SIM PKB (Guru MGMP Matematika dan IPA)	jumlah peserta Diklat Berbasis SIM PKB (Guru MGMP Matematika dan IPA)	120(org)	120(org)	147	120(org)	150	120(org)	120	120(org)	132	120(org)	145	120(org)	160	120(org)	853.78	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
	Diklat Berbasis SIM PKB (Guru MGMP IPS dan PKN)	jumlah peserta Diklat Berbasis SIM PKB (Guru MGMP IPS dan PKN)			138	120(org)	141	120(org)	144	120(org)	158	120(org)	174	120(org)	192	120(org)	947.28	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
	Diklat Berbasis SIM PKB (Guru MGMP Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)	jumlah peserta Diklat Berbasis SIM PKB (Guru MGMP Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)			138	120(org)	141	120(org)	144	120(org)	158						-	581.61	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru	Jumlah Guru yang mengikuti diklat											120(org)	-	120(org)	-	120(org)	-	Dikbud	Tanjung Jabung
	Seleksi Calon Pengawas Sekolah	Terselenggaranya Seleksi Calon Pengawas Sekolah	0	0	-	-	-	50(org)	64	50(org)	70.40	50(org)	77.44	50(org)	85.18	50(org)	297.02	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
	Lomba Guru, Kepala TK, SD, SMP, serta Pengawas yang Berprestasi dan Berdedikasi serta Pengiriman Pemenang Untuk Mengikuti Lomba di Tingkat Provinsi	Jumlah Guru dan Pengawas yang berprestasi	0	40 Orang	98	40 Orang	99	40 Orang	142	40 Orang	156	40(org)	172	40(org)	189	40(org)	856.41	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
	Pembinaan terhadap Guru	Jumlah GTK yang dilakukan Pembinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	148	100%	163	100%	310.80	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
	Penilaian angka kredit point jabatan fungsional guru/pengawas	Jumlah Guru/Pengawas meningkat jenjang kariernya	100%	100%	96	100%	98	436(org)	151	436(org)	166	436(org)	183	436(org)	201	436(org)	894.65	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	
	Pelaksanaan, Pengelolaan Data dan Pembayaran Aneka Tunjangan Guru serta Guru Tidak Tetap (GTT)	Persentase Pelaksanaan, Pengelolaan Data dan Pembayaran Aneka Tunjangan Guru serta Guru Tidak Tetap (GTT)	100%	100%	10,578	100%	6,239	100%	6,683	100%	7,351	100%	8,086	100%	8,8946	100%	30,868.60	Dikbud	Tanjung Jabung Barat	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Diklat Calon Pengawas	Jumlah calon Pengawas yang dilatih	0	0	-	-	-	40 orang	218	40 orang	239.80	40 orang	263.78	40 orang	290.16	120 Orang		Dikbud	Tanjung Jabung
		Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	Jumlah peserta diklat Cakep	80		105	80	107	80(org)	169	80(org)	186	30(org)	224.5	30(org)	224.5	30(org)	1,015.31		
		10. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Pengembangan Budaya Daerah dalam rangka memperkaya khasanah Budaya Tanjung Jabung Barat	0	0	-	1 lembaga & 1 sanggar	445	1 lembaga & 1 sanggar	746	2 lembaga & 2 sanggar	816	2 lembaga & 3 sanggar	886	3 lembaga & 3 sanggar	972	3 lembaga & 3 sanggar	3,865	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Dana Operasional Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi Kab. Tanjab Barat	persentase LAM yang difasilitasi	-	-	-		242		171	2 Lembaga	188	2 Lembaga	207	3 Lembaga	228	3 Lembaga	1,036	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pawai Budaya Hari Ulang Tahun Tanjung Jabung Barat	Jumlah kelompok pertunjukan budaya yang difasilitasi	0	30 Kelompok		30 Kelompok		30 Kelompok		30 Kelompok		30 Kelompok		30 Kelompok		30 Kelompok		Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Workshop seni dan budaya	Jumlah Peserta Pelaku Seni yang dilatih																Dikbud	Tanjung Jabung
		Pembinaan Kelompok Paduan Suara	Jumlah kelompok Paduan suara yang dibina				1 padus	70	1 padus	75	1 padus	80	1 padus	85	1 padus	100	1 padus	410	Dikbud	Tanjung Jabung
		Pagelaran Kesenian	Jumlah event pertunjukan budaya yang difasilitasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 pertgelaran	180	2 event	182	2 event	183	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pelestarian Budaya	Jumlah pagelaran budaya yang ditampilkan dalam Daerah dan Luar Daerah		2 pertgelaran		2 pertgelaran		2 pertgelaran		2 pertgelaran		2 pertgelaran		2 pertgelaran				Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Paduan Suara Gita Bahana Nusantara (GBN)	Jumlah Kecamatan yang dilakukan selleksi GBN	-	-	-	13 Kecamatan	67	13 Kecamatan	100	13 Kecamatan	110	13 Kecamatan	121	13 Kecamatan	133	13 Kecamatan	531	Dikbud	Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Peningkatan Kualitas Tatahan Masyarakat dalam beragama dan berbudaya	SS.4 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah	Fasilitasi Kegiatan Sanggar	Jumlah sanggar yang dibina	-	-	-	1 sanggar	135	1 sanggar	150	2 sanggar	158	3 sanggar	165	3 sanggar	182	3 sanggar	790.08	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Sosialisasi Mengenai Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tingkat Menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	-	-	-	-	120 Orang	71	120 Orang	78	120 Orang	86	120 Orang	95	120 Orang	330	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pembinaan Pelajaran Muatan Lokal Seni Budaya Sekolah Dasar dan Menengah Pertama atau Setingkatnya	Persentase sekolah yang menerapkan Muatan Lokal Daerah	-	-	-	-	-	10%	54	10%	62	20%	65	30%	68	30%	249.77	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan	-	-	-	1 paket	180	1 paket	200	1 paket	220	1 paket	242	1 paket	266	5 Paket	1,108	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		11. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatkan peran dan Pemahaman masyarakat akan keragaman budaya	0	0	-	2 budaya	417	3 budaya	625	4 budaya	1,246	5 budaya	1,350	6 budaya	1,464	6 budaya	5,102	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Biaya Operasional Sanggar Pemerintah Daaerah	Persentase pengelolaan sanggar Pemda akuntabel	0	0	-	-	-	-	-	-	-	100%	115	100%	120	100%	235	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pawai Budaya Hari Ulang Tahun Tanjung Jabung Barat	Jumlah Kelompok Budaya yang difasilitasi				30 klpk	78	30 klpk	89	30 klpk	98	30 klpk	91	30 klpk	91	30 klpk	447	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Pagelaran Seni Budaya dalam dan luar Provinsi	Terwakilkannya Kab. Tanjab Barat pada Festival/Pagelan di Dalam dan Luar Provinsi				2 Lokasi	140	1 Lokasi	161	1 Lokasi	177	1 Lokasi	195	1 Lokasi	214	1 Lokasi	887	Dikbud	Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2015	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.Juta)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Islami	Jumlah kesenian islami yang dikembangkan				2 Kegiatan	136	2 Kegiatan	209	2 Kegiatan	219	2 Kegiatan	230	2 Kegiatan	242	2 Kegiatan	1,036.75	Dikbud	Tanjung Jabung Barat
		Identifikasi Budaya Daerah Kab. Tanjab Barat	Jumlah Kecamatan yang budaya teridentifikasi	13 Kecamatan	13 Kecamatan	200	13 Kecamatan	250	13 Kecamatan	275	13 Kecamatan	303	13 Kecamatan	333	13 Kecamatan	366	13 Kecamatan	1,726	Dikbud	Tanjung Jabung Barat



BAB VII

KINERJA PENYELENGAARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu **keluaran (output)** dan **hasil (outcome)** dalam pemanfaatan APBD.

Renstra akan menjadi **acuan (guidance)** pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin **akuntabel (accountable)**.

Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran.
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas. (Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019)

Target Kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun 2016-2021. Penetapan Target Kinerja Sasaran Strategis (SS) serta Penetapan Target Kinerja Sasaran Program (SP) mengacu pada ketentuan yang terdapat pada RPJMD. Adapun penjelasan dari setiap **Indikator Kinerja Prioritas** Dinas Pendidikan yg mengacu pada **RPJMD** adalah sebagai berikut :



Tabel T-C. 28
**INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
			2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat								
1.1	APK PAUD usia 3-6 tahun	39,17%	39,17%	39,57%	39,97%	40,37%	40,77%	41,18%	41,18%
1.2	Angka melek huruf penduduk usia dewasa Usia 15 - 59 th	98,36%	98,41%	98,46%	98,50%	98,50%	98,60%	98,70%	98,70%
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
2.1	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	7,37	7,41	7,44	7,50	7,56	7,62	7,68	7,68
2.2	APK SD/SDLB/Paket A	117,63%	117,64%	117,66%	117,67%	117,68%	117,70%	117,71%	117,71%
2.3	APM SD/SDLB	99,01%	99,02%	99,03%	99,04%	99,05%	99,06%	99,07%	99,07%
2.4	APK SMP/SMPLB/Paket B	98,92%	98,92%	99,94%	99,96%	99,98%	99%	99,02%	99,02%
2.5	APM SMP/SMPLB	72,94%	73,10%	73,25%	73,41%	73,56%	73,72%	73,88%	73,88%
2.6	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,00%	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.7	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,00%	97,92%	98,41%	98,90%	99,40%	99,89%	100%	100%
2.8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	92,00%	93,38%	94,78%	96,20%	97,65%	99,11%	100%	100%
2.9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	87,00%	87,87%	88,75%	89,64%	90,53%	91,44%	92,35%	92,35%
3	Program Guru dan Tenaga Kependidikan								
3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	74%	81,23%	87,89%	94,73%	95%	99,23%	100%	100%
4	Program Pengembangan Nilai Budaya								
4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	0	2%	2,20%	2,42%	2,66%	2,93%	3,00%	3,00%
4.2	Banyaknya Hasil Karya Individu yang telah memiliki HAKI	0	0	1 Karya	5 Karya				
5	Program Pemberian Beasiswa Daerah								
5.1	Jumlah Masyarakat penerima Beasiswa berprestasi	0	0	0	20	35	48	64	64



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016—2021 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, serta partisipasi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Dinas Pendidikan telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta rencana sasaran Kemendikbud dalam rangka mencapai sasaran program Pemerintah Pusat. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, **Sasaran Program**, dan **Sasaran Kegiatan**, rincian **IKSS**, **IKP** dan **IKK**, serta memantapkan penerapan **Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)** untuk meningkatkan mutu **keluaran** (*output*) dan **hasil** (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai pada periode 2016—2021. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Permendikbud No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada Renstra eselon I.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, termasuk member kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

Kuala Tungkal, Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ARTUNIS M. YUSUF, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198501 1 001

LAMPIRAN -

LAMPIRAN

Tabel T-C. 23

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015**

No	Indikator Kinerja sesuai TUPOKSI	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun Ke-					Rasio capaian Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Melek Huruf				98.10%	98.30%	98.50%	98.70%	98.90%		97.93%	98.17%	98.21%	98.36%	-	0.996	0.997	0.995	0.995
2	APK PAUD				50.20%	52.90%	55.60%	58.30%	61%				42.03%	44.71%	-	-	-	0.721	0.733
3	APK SD				116.22%	116.44%	116.66%	116.88%	117.10%	117.12%	117.43%	117.52%	117.58%	117.63%	1.008	1.009	1.007	1.006	1.005
4	APM SD				97.32%	97.54%	97.76%	97.98%	98.20%	98.51%	98.83%	98.94%	98.98%	99.01%	1.012	1.013	1.012	1.01	1.008
5	APK SMP				97.21%	98.31%	99.41%	1005.51%	101.61%	97.89%	98.79%	98.81%	98.84%	98.90%	1.007	1.005	0.994	0.098	0.973
6	APM SMP				71.26%	72.06%	74.16%	75.26%	76.36%	71.70%	72.83%	72.89%	72.91%	72.94%	1.006	1.011	0.983	0.969	0.955
7	APK SMA/SMK				68.04%	69.97%	71.90%	73.83%	75.76%	67.44%	67.97%	69.91%	69.94%	69.94%	0.991	0.971	0.972	0.947	0.923
8	APM SMA/SMK				48.01%	49.94%	51.87%	53.80%	55.73%	47.39%	48.26%	51.89%	51.91%	51.95%	0.987	0.966	1	0.965	0.932
9	Angka Rata-rata Lama Bersekolah (Thn)				7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	7.51	7.54	8.1	8.3	8.5	0.975	0.954	1	1	1
10	Rasio Guru thd Murid				1:22	1:20	1:19	1:18	1:17						1.616	1.583	1.377	1.318	1.319
	Tingkat SD									01:17.1	01:15.2	01:16.6	01:15.5	1:15	1.286	1.315	1.144	1.161	1.133
	Tingkat SMP									01:11.3	01:10.8	01:11.8	01:12.2	01:11.3	1.946	1.851	1.61	1.475	1.504

Tabel T-C. 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-n (dlm Juta)					Realisasi Anggaran Tahun ke-n (dlm juta)					Rasio Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan		
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	41.748	38.05	52.55	68.486	43.26	40.548	36.292	47.946	61.045	41.635	0.971	0.954	0.912	0.891	0.962	30.24%	6.17%	

Tabel T-C. 25
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat	SS1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	IKSS1.1	Angka melek huruf penduduk usia dewasa Usia 15 - 59 th	98,41%	98,46%	98,50%	98,50%	98,60%	98,70%
	IKSS1.2			Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	7,58 tahun	7,65 tahun	7,73 tahun	7,80 tahun	7,87 tahun	7,95 tahun	
2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS2	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	IKSS2.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				IKSS2.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97.92%	98.41%	98.90%	99.40%	99.89%	100%
				IKSS2.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	93.38%	94.78%	96.20%	97.65%	99.11%	100%
				IKSS2.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	87.87%	88.75%	89.64%	90.53%	91.44%	92.35%
		SS3	Meningkatkan Profesionallisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	IKSS3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	81,23%	87,89%	94,73%	95%	99,23%	100%
3	Peningkatan Kualitas Tatanan Masyarakat dalam beragama dan berbudaya	SS4	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah	IKSS4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	2%	2.20%	2.42%	2.66%	2.93%	3.00%
				IKSS4.2	Jumlah Hasil Karya Individu yang telah memiliki HAKI	0	2 Karya	1 Karya	1 Karya	1 Karya	5 Karya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi	SS5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, AKIP dan Keuangan	IKSS5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65	66	67	68	69	70
				IKSS5.2	Nilai AKIP	61	65	68	70	73	75
				IKSS5.3	Pelaporan Keuangan Sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				IKSS6.1	Jumlah Masyarakat Lulusan Perguruan Tinggi	0	0	20	35	48	64

TABEL T- C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

VISI (RPJMD)		: Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur Bermartabat dan Berkualitas					
MISI II (RPJMD)		: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1		2		3		4	
T1	Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat	SS1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	1.1.	Penyediaan sarana dan Prasarana pada semua tingkatan pendidikan secara merata.	1.1.1	Membangun dan merehabilitasi sarana prasarana penunjang pendidikan.
				1.2	Pengawasan yg lebih ketat dan akuntabel dalam penggunaan anggaran pendidikan yg bersumber dana BOS, KIP dan lainnya sehingga tepat sasaran.	1.2.1	Mendorong pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan pendidikan.
						1.2.2	Membangun koordinasi yg lebih aktif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam mendorong pembangunan pendidikan di Kab.Tanjung Jabung Barat.
T2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS2	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	2.1	Penyediaan sarana dan Prasarana yg bermutu pada semua tingkatan pendidikan secara merata.	2.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana bermutu penunjang pendidikan yg lebih merata.
						2.1.2	Menerapkan kurikulum belajar sesuai dengan standar nasional
				2.2	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan berkompeten/professional secara merata.	2.2.1	Kualifikasi dan Sertifikasi
						2.2.2	Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan
				2.3	Penyediaan system pembelajaran sesuai dengan SNP (Standar Nasional Pendidikan)	2.3.1	Penguatan evaluasi akreditasi sekolah
						2.3.2	Mendorong peningkatan akreditasi sekolah

MISI II (RPJMD) : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1		2		3		4	
T2	Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter	SS3	Meningkatkan Profesionalisme dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	3.1	Meningkatkan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui sertifikasi profesi	3.1.1	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat teknis
						3.1.2	Meningkatkan mutu pendidik melalui pendidikan terstruktur dan berkualitas
				3.2	Penyediaan data dan informasi pendidikan	3.2.1	Validasi Data Pokok Pendidikan
						3.2.2	Penyediaan subsidi bagi Pendidik dan tenaga kependidikan

MISI IV (RPJMD) :		Meningkatkan persatuan dan kesatuan Daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintah yang baik					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1		2		3		4	
T3	Peningkatan Kualitas Tatanan Masyarakat dalam beragama dan berbudaya	SS4	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya dan pelaku budaya dalam melindungi budaya Daerah	4.1	Meningkatkan Peran masyarakat dalam pelestarian dan keragaman Budaya	4.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan seni budaya yg memadai
						4.1.2	Mengali kebudayaan local untuk dikembangkan lagi
				4.2	Peningkatan Khasanah Budaya Daerah	4.2.1	Peningkatan penerapan mata pelajaran muatan local disekolah
						4.2.2	Penyediaan sarana dan prasana kegiatan seni budaya.
T4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi	SS5	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh bidang;	5.1.1	Penyempurnaan sistem manajemen dan akuntabilitas pelaporan kinerja Dinas DIKBUD secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik
				5.2	Penguatan pengawasan terhadap kinerja bidang dan subbidang	5.2.1	Evaluasi rutin
				5.3	Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;	5.3.1	Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang.

Tabel T-C. 28
**INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat								
1.1	APK PAUD usia 3-6 tahun	39.17%	39.17%	39.57%	39.97%	40.37%	40.77%	41.18%	41.18%
1.2	Angka melek huruf penduduk usia dewasa Usia 15 - 59 th	98,36%	98,41%	98,46%	98,50%	98,50%	98,60%	98,70%	98,70%
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
2.1	Angka Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	7.37	7.41	7.44	7.50	7.56	7.62	7.68	7.68
2.2	APK SD/SDLB/Paket A	117,63%	117,64%	117,66%	117,67%	117,68%	117,70%	117,71%	117,71%
2.3	APM SD/SDLB	99,01%	99,02%	99,03%	99,04%	99,05%	99,06%	99,07%	99,07%
2.4	APK SMP/SMPLB/Paket B	98,92%	98,92%	99,94%	99,96%	99,98%	99%	99,02%	99,02%
2.5	APM SMP/SMPLB	72,94%	73,10%	73,25%	73,41%	73,56%	73,72%	73,88%	73,88%
2.6	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.00%	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.7	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96.00%	97.92%	98.41%	98.90%	99.40%	99.89%	100%	100%
2.8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	92.00%	93.38%	94.78%	96.20%	97.65%	99.11%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	87.00%	87.87%	88.75%	89.64%	90.53%	91.44%	92.35%	92.35%
3	Program Guru dan Tenaga Kependidikan								
3.1	Persentase Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya Profesional (Kualifikasi dan Sertifikasi)	74%	81,23%	87,89%	94,73%	95%	99,23%	100%	100%
4	Program Pengembangan Nilai Budaya								
4.1	Persentase Lembaga Budaya yang memiliki legalitas	0	2%	2.20%	2.42%	2.66%	2.93%	3.00%	3.00%
4.2	Banyaknya Hasil Karya Individu yang telah memiliki HAKI	0	0	1 Karya	5 Karya				
5	Program Pemberian Beasiswa Daerah								
5.1	Jumlah Masyarakat penerima Beasiswa berprestasi	0	0	0	20	35	48	64	64